

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana

INOVASI KEPALA DAERAH

DALAM IMPLEMENTASI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



WAWANCARA EKSKLUSIF:

M. JUSUF KALLA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ALEX NOERDIN
GUBERNUR SUMATRA SELATAN

MUZAKIR SAI SOHAR
BUPATI MUARA ENIM

MARSELINUS Y. W. PETU
BUPATI ENDE



” SEKARANG KITA SEDANG BERSAING
DENGAN BANGSA LAIN, KARENA ITU KITA
HARUS BERSATU, TERBUKA, DAN
BERANI BERINOVASI AGAR BISA
MENJADI BANGSA PEMENANG. ”

PRESIDEN JOKO WIDODO

dalam Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang diselenggarakan di
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (24 Mei 2016)

Sumber: www.presidentri.go.id



SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wignyo Adiyoso, Ali Muharam, Wiky Witarni, Rita Miranda, Edy Purwanto, Zamilah Chairani, Lilly Widayati, Hari Nasiri, Shri Mulyanto, Wahyu Pribadi, Feita Puspita Murti

PEMIMPIN REDAKSI

Karyoto

EDITOR

Setio Utomo

GRAFIS DAN TATA LETAK

Hafidh Aditama

DISTRIBUSI/SIRKULASI

Eko Slamet Suratman

ADMINISTRASI/KEUANGAN

Dwiyanto Bambang P., Nita Agustin

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Bappenas
Jln. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telp. (021) 319 28280, 319 28285,
319 28279
Pos-el: simpul@bappenas.go.id

Dari Kami

Beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kita yang ke-72. Banyak hal yang sudah dicapai dalam usia 72 tahun kemerdekaan. Hampir dalam semua bidang kehidupan berbangsa kita mengalami kemajuan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Otonomi daerah merupakan salah satu hasil pembangunan dan perkembangan dari sistem hukum dan politik yang terjadi pada era kemerdekaan. Pada era otonomi daerah, rakyat Indonesia di seluruh daerah dapat memilih para pemimpinnya secara langsung melalui Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada). Pilkada secara langsung memberi peluang bagi kepala daerah terpilih untuk mengelola daerahnya secara otonom sesuai dengan undang-undang.

Dengan modal kemerdekaan, otonomi daerah, dan pemilihan kepala daerah secara langsung maka keberhasilan pembangunan di daerah sangat bergantung pada inovasi dan kepemimpinan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada. Dalam diskusi dengan SIMPUL, Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla, mengingatkan dan menekankan tentang pentingnya tiga hal dalam pembangunan di daerah, yaitu kepemimpinan, inovasi, dan konsistensi. Dalam amanatnya, Wakil Presiden juga mengingatkan tentang perbedaan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang ada di tiap-tiap daerah sehingga pendekatan pembangunan dan skala prioritasnya bisa berbeda. Pembangunan di daerah akan sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah melihat dan mengelola sumber daya yang ada.

Pada edisi kali ini kami menyajikan tulisan tentang beberapa kepala daerah yang berhasil dalam membuat perencanaan pembangunan dengan sangat baik dan mendapatkan penghargaan secara nasional dari Bappenas (Anugerah Pangripta Nusantara) dalam bidang perencanaan pembangunan, seperti Kabupaten Ende, Kabupaten Muara Enim, dan Provinsi Sumatra Selatan. Kami mencoba menggali dan mendalami langkah-langkah kepala daerah untuk mencapai prestasi tersebut.

Semoga sajian kali ini menjadi inspirasi bagi pembaca khususnya para perencana pembangunan di seluruh Indonesia sebagai bagian sumbangsih dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Merdeka!

Redaksi

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan dapat dikirimkan kapan saja. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

Daftar Isi

GERBANG // 6

CAKRAWALA



M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden
Republik Indonesia

Perlunya Inovasi dan
Kreativitas
dalam Pembangunan
Daerah // 8



ALEX NOERDIN
Gubernur Sumatera
Selatan

Inovasi untuk Sumatera
Selatan yang Sejahtera,
Maju, dan Berdaya Saing
Internasional // 14



MUZAKIR SAI SOHAR
Bupati Muara Enim

Tujuh Inovasi
Perencanaan untuk
Mewujudkan Tujuh
Program Prioritas // 20



MARSELINUS Y.W. PETU
Bupati Ende

Pembangunan Harus
Dimulai dari Desa dan
Kelurahan // 24

LIPUTAN



Kerja Sama
Peningkatan
Kapasitas ASN di
Papua dan Papua
Barat // 28

Seleksi Penerimaan
Program Beasiswa
Pusbindiklatren
2017 // 30

Pelaksanaan
Magang Dalam
Negeri 2017
Pusbindiklatren
Bappenas // 33



Workshop PAK-
APAK Angkatan I
Tahun 2017 // 35

Penataan Arsip
Elektronik
Pusbindiklatren
// 38

SOSOK ALUMNI



NIA NOORRAHMAH

Belajar Ilmu, Budaya, dan Perspektif Kehidupan // 42



APRI DIRA TOME

Pengalaman yang Bermanfaat // 44

INFO JFP

Diklat Fungsional Perencana // 56

INFO AP2I

Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional dalam Perspektif Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil // 59

AKADEMIKA



47

TESIS TERBAIK 2017: Analisis Rantai Distribusi Semen di Koridor Selatan Jawa // 45

Mempelajari *Think Tank* Pemerintah Jepang // 53

OPINI

Inovasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Muara Enim // 63

Optimasi Pengelolaan Fungsi *Think Tank* di Bappenas // 68

Inovasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim // 72

Implementasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ende // 76

Pembangunan Daerah Pinggiran dengan Meningkatkan Daya Saing // 80



Foto: www.batasnegri.com

80

SELINGAN

Antisipasi Serangan *Ransomware* // 85



Mendobrak Belenggu dengan Inovasi

Oleh : Nur Hygiawati Rahayu

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Secara harfiah, kata inovasi yang diadopsi dari Bahasa Inggris, *innovation*, berarti pembaruan atau penerapan sesuatu yang baru. Inovasi tidak selalu disertai dengan penemuan (*invention*), dapat pula memanfaatkan sumber daya yang ada, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan inovasi sebagai implementasi dari suatu produk barang atau jasa yang baru ataupun yang lebih baik, suatu proses yang baru, atau metode yang baru di dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Dalam pemerintahan, proses bisnis atau mekanisme kerja telah ditetapkan dengan detail dalam peraturan perundang-undangan yang terkadang dituding membelenggu kreativitas dan akhirnya membatasi inovasi para aparatur negara dalam menjalankan roda pembangunan. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan sering kali menegaskan agar aparatur pemerintahan tidak sibuk dengan urusan administrasi, tetapi mengembangkan kemampuan dalam memikirkan hal-hal yang bersifat inovatif. Salah satu yang kemudian ditekankan oleh beliau pada saat sambutan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Jakarta adalah mengingatkan kembali agar pegawai pemerintah juga memperhatikan hal-hal yang terjadi di tingkat global saat ini. Jika Indonesia tidak mengikuti perkembangan dunia, bisa dipastikan akan terus tertinggal dari negara-negara lain.

Pada acara tersebut, Presiden Joko Widodo menampilkan dua sosok yang dijadikan sebagai

contoh pendobrak, pemikir besar yang keluar dari cara-cara biasa (*business as usual*). Tokoh tersebut adalah Elon Musk yang meluncurkan berbagai produk inovatif, di antaranya beberapa perangkat lunak (*software*) dan mobil listrik Tesla. Saat ini, ia sedang mengembangkan sistem transportasi melalui perusahaan Space X yang didirikannya dengan tujuan untuk membentuk koloni manusia yang dapat hidup di Planet Mars, satu hal yang jauh di luar pemikiran manusia umumnya. Selain itu, ditayangkan juga mengenai Jack Ma, pendiri Alibaba Group, perusahaan *e-commerce* terbesar di Tiongkok. Sejalan dengan perkembangan perusahaannya, salah satu miliuner dunia ini mengembangkan Alipay, sistem pembayaran yang tidak lagi menggunakan uang tunai, kartu debit, maupun kartu kredit, tetapi dengan telepon seluler, yang sekarang sudah memasyarakat di negara berpenduduk terbesar itu.

Lalu, apakah pemerintahan kita tidak berinovasi?

Salah satu indikator terintegrasi (indeks) yang menunjukkan peringkat kinerja kemampuan inovasi dari negara-negara di seluruh dunia adalah *Global Innovation Index* (GII). Setiap tahun, sejak tahun 2007, laporan GII diluncurkan dengan sejumlah indikator sebagai dasar penilaian. Tingkat inovasi suatu negara diukur dari berbagai aspek, seperti pengembangan dan penelitian sumber daya manusia, politik, lingkungan, pendidikan, infrastruktur, dan bisnis. Menurut laporan GII, kapasitas inovasi suatu negara tidak saja dilihat dari aktivitas yang telah dikerjakan di negara tersebut, tetapi juga dampak terhadap global.

Berdasarkan laporan GII, telah terjadi perubahan ruang lingkup inovasi. Pada awalnya produk yang dihasilkan berasal dari proses penelitian dan pengembangan (litbang) sehingga banyak inovasi dihasilkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tim litbang yang berpendidikan sangat tinggi secara intensif. Saat ini telah berubah, inovasi bisa saja dihasilkan dari kegiatan nonlitbang dengan tidak mengurangi kualitasnya. Kunci penting lainnya, inovasi berperan signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terbukti beberapa negara menempatkan inovasi sebagai pusat strategi pertumbuhannya. Sebagai contoh, Tiongkok dengan *Belt and Road Initiative* dan Malaysia dengan *National Transformation Program*.

Pada tahun 2016, GII mengeluarkan laporan yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-88 dari 128 negara. Meskipun terlihat naik dari tahun sebelumnya (peringkat ke-97 dari 144 negara), dibandingkan negara-negara berkembang di Asia lainnya, Indonesia masih di bawah Malaysia (35), Vietnam (59), bahkan Filipina (74). Indonesia mendapatkan nilai yang rendah dari aspek kelembagaan, yang meliputi kondisi politik, regulasi, dan kemudahan berbisnis. Aspek-aspek ini yang menegaskan perlunya reformasi struktural secara signifikan di Indonesia.

Tahun 2017, Indonesia meningkat menjadi peringkat ke-87 dari 127 negara, yang menunjukkan tidak bertambah baiknya peringkat inovasi Indonesia. Pada tahun ini, GII mengambil tema inovasi untuk menjawab tantangan pangan dan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor dasar dan tertua dalam pembangunan, tetapi sampai saat ini masih menjadi kebutuhan pokok yang menghadapi kebutuhan global dan kompetisi dengan keterbatasan sumber daya alam. Inovasi merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan prinsip berkelanjutan. Dalam laporan GII 2017, Indonesia merupakan konsumen pupuk terbesar ke-5, tetapi tidak banyak menggunakan mesin dalam meningkatkan produksi pertanian dan juga tingkat *foreign development investment (FDI) inflows* yang rendah. Berbeda dengan Tiongkok, yang masuk

lima besar di ketiga kategori. Penggunaan pupuk yang banyak dan mesin yang tinggi di Tiongkok berdampak pada penerimaan FDI yang tinggi.

Geliat nasional dalam skala besar terkait inovasi memang belum terlihat dari peringkat GII, tetapi mengamati pergerakan daerah dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi perubahan cukup penting dalam hal inovasi. Saat pembukaan Musrenbangnas 2017, pada kala Presiden mempertanyakan inovasi pemerintahan, sebenarnya ada kegiatan pemberian penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) untuk daerah-daerah yang menerapkan inovasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Inovasi yang dilakukan tidak saja terbatas dalam bentuk perencanaan yang menghasilkan adanya produk baru ataupun perbaikan dari sebelumnya, tetapi juga mencakup penerapan strategi pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif. Dengan sumber daya yang biasa, dapat menghasilkan dampak yang luar biasa. Beberapa penerima APN yang tidak banyak diekspose media akan diangkat di SIMPUL edisi kali ini.

Inovasi sangatlah diperlukan oleh negara ini. Dengan kondisi yang saat ini semakin berat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan terobosan baru. Proses perencanaan juga telah bergerak dengan prinsip *money follows program*. Selain itu, saat ini digencarkan penggunaan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana program dan proyek yang menjadi prioritas nasional, di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendanaan infrastruktur non-APBN (PINA) berperan dalam mendukung sisi finansial. Di sisi proses bisnis, dalam kerangka reformasi birokrasi perlu diperkuat juga aspek reformasi strukturalnya. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia sebagai *human capital*. Kompetensi terus ditingkatkan untuk mendapatkan inovasi dan menjalankannya dengan konsisten untuk kemajuan bangsa. Aparatur Sipil Negara seyogyanya bukanlah semata administrator, tetapi para pengambil kebijakan yang memiliki jiwa pemikir (*thinker*) dan berlaku sebagai *innovator*. ■

A portrait of M. Jusuf Kalla, an Indonesian politician, wearing a white shirt and glasses, with his hands clasped in front of him. The background is a blurred office setting.

M. JUSUF KALLA

Wakil Presiden Republik Indonesia

Perlunya Inovasi dan Kreativitas dalam Pembangunan Daerah

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) memiliki visi dan misi yang terangkum dalam sembilan program prioritas bertajuk Nawacita. Dalam Nawacita Program ke-3 disebutkan bahwa pemerintah Jokowi-JK ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan program tersebut diperlukan perencanaan dan inovasi dari setiap kepala daerah dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah.

“Setiap daerah harus mengetahui kekuatan, kemampuan, dan tujuan yang akan dicapai”

Dalam sesi wawancara dengan SIMPUL, Wakil Presiden menyatakan bahwa untuk mencapai harapan dari Program ke-3 Nawacita tersebut, sistem perencanaan pembangunan di Indonesia perlu diperhatikan. Sejak zaman orde lama (tahun 1970-an), sistem perencanaan pembangunan di Indonesia telah dirancang bertahap mulai dari perencanaan yang berada di Bappenas, serta Bappeda tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Penerapannya tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda pada setiap periode.

Lebih lanjut Wakil Presiden menjelaskan bahwa kemajuan setiap daerah, baik provinsi dan terutama kabupaten/kota dapat tercapai melalui implementasi

perencanaan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun daerah (RPJPD). Selain itu, kepemimpinan dan kreativitas kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) serta semangat/*spirit* dari masyarakat turut mendukung kemajuan tiap-tiap daerah.

Perencanaan dapat mencakup semua hal, baik perencanaan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Semua harus direncanakan dengan baik dan terukur. Sebagai contoh, daerah yang ingin menjadi daerah industri maka sistem pendidikan dan sistem vokasionalnya harus dibentuk. Namun, bila suatu daerah yang direncanakan untuk daerah wisata maka sistem perencanaan yang dibangun juga harus disesuaikan. “Setiap daerah harus mengetahui kekuatan, kemampuan, dan tujuan yang akan dicapai,” ujar Wakil Presiden. Di Jawa, daerah bisa maju karena industri. Namun, di luar Jawa, tentu ada daerah yang maju karena perkebunan, sumber daya alam, ataupun investasi dari luar. Dengan demikian, rumusan untuk kemajuan setiap daerah bisa berbeda-beda, bergantung situasi dan kondisi di daerah tersebut.

Wakil Presiden menekankan bahwa salah satu kunci kemajuan suatu daerah adalah kepemimpinan (*leadership*) dari kepala daerah. Selain dari kepemimpinan kepala daerah, kemajuan suatu daerah juga bergantung dari sumber daya alamnya. Namun, jika suatu daerah memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik maka daerah tersebut juga sulit untuk maju. Potensi sumber daya alam dapat mengundang/menarik pihak luar untuk berinvestasi sehingga mendorong kemajuan daerah tersebut.



▲ Pantai Teluk Hijau, salah satu objek wisata yang diunggulkan dalam pengembangan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah wisata.
Foto: www.anekatempatwisata.com

Berbicara soal investasi, tentunya akan terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menanggapi hal ini, Wakil Presiden mengungkapkan bahwa investasi diperlukan sebagai motor penggerak kemajuan suatu daerah. Indonesia sangat beruntung karena sebagai negara yang besar, tingkat permintaan/konsumsinya pasti tinggi. Hal ini yang menarik para investor. Namun, sebagai negara kepulauan, biaya (*cost*) yang dibutuhkan tentunya relatif lebih tinggi dibandingkan negara daratan. Wakil Presiden juga menyinggung soal daerah-daerah perbatasan di Indonesia yang masih relatif tertinggal, apalagi untuk berkompetisi dengan negara tetangga. “Daerah perbatasan harus diberikan insentif khusus karena lokasinya terpencil serta logistiknya tidak mudah dan tidak murah,” tegas Wakil Presiden.

Wakil Presiden memberikan arahan bahwa perencanaan setiap daerah harus sesuai kemampuan dan kelebihannya. Kekurangan setiap daerah bisa diperbaiki dengan kreativitas. Jika daerahnya tidak memiliki sumber daya alam, daerah

tersebut mungkin bisa dikembangkan untuk daerah wisata dan sebagainya. Hal itu menjadi salah satu pendorong tumbuhnya investasi di daerah tersebut. Pemerintah pusat berkewajiban untuk mendorong kreativitas perencanaan pembangunan daerah agar lebih baik. Arah yang perlu ditempuh adalah melalui kreativitas dari sektor pendidikan, teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah pandangan visioner dari kepala daerah. Beberapa kepala daerah telah banyak dikenal melalui kreativitasnya, seperti Walikota Surabaya, Walikota Bandung, Bupati Banyuwangi, ataupun Bupati Bantaeng. Namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak kepala daerah lain yang lebih baik, meskipun tidak banyak terpublikasi.

Salah satu kreativitas yang dapat dimunculkan oleh seorang kepala daerah adalah kreativitas dari sektor perdagangan. Wakil Presiden memberikan contoh ketika memimpin Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan pada tahun 1990-an. Wakil Presiden menuturkan, “Bersama Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu, kami menyadari bahwa



untuk memajukan daerah ini haruslah dihasilkan produk-produk yang mahal, baik untuk produk perikanan maupun perkebunan.” Adapun produk pertanian dianggap sulit untuk memajukan suatu daerah karena harganya selalu dikontrol pemerintah. Sektor perdagangan di Sulawesi Selatan pun lebih difokuskan untuk produk-produk seperti udang, cokelat, kopi, dan jagung. Akhirnya pada saat terjadi krisis, masyarakat tetap memiliki pendapatan cukup tinggi dan maju sampai sekarang. Pendapatan daerah juga didapat dari tingginya ekspor dari produk-produk yang dihasilkan daerah tersebut.

Dalam pandangannya, Wakil Presiden juga menekankan perlunya pemerintah daerah untuk mendorong berkembangnya pengusaha-pengusaha

kecil. Sebagai contoh di Riau (Sumatra), penghasil ekspor tinggi dimiliki pengusaha-pengusaha besar, tetapi di daerah tersebut tidak terjadi pemerataan yang baik karena pengusaha-pengusaha kecil

kurang dikembangkan. Sebaliknya, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, pertumbuhannya mencapai tiga tingkat di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Hal tersebut salah satunya disebabkan tumbuhnya usaha-usaha kecil secara merata.

Selama ini, pemerintah telah banyak membuat instrumen-instrumen untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi nasional maupun daerah, di antaranya melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan selanjutnya melalui *Master Plan* Percepatan dan Perluasan

“Daerah perbatasan harus diberikan insentif khusus karena lokasinya terpencil serta logistiknya tidak mudah dan tidak murah...”



▲ Sesi wawancara SIMPUL dengan Wakil Presiden
Foto: Setwapres

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicetuskan pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika disinggung mengenai hal tersebut, Wakil Presiden justru menyatakan jika penggunaan instrumen-instrumen tersebut kurang efektif dan tidak pernah ada contoh yang berhasil. “Melalui instrumen tersebut, semua daerah seolah dibuatkan program yang sama untuk maju. Hal itu tidak bisa dilakukan karena setiap daerah membutuhkan perlakuan yang berbeda,” tegas Wakil Presiden. Di Jawa, industri apapun bisa berjalan, baik sebagai pekerja maupun konsumen. Namun, di Sulawesi, Maluku, atau Kalimantan kemungkinan hanya industri sumber daya alam yang bisa berjalan. Dengan demikian, instrumen-instrumen tersebut tidak terlalu berhasil mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Apalagi jika infrastruktur yang tersedia di suatu daerah sangat kurang. Di sisi lain, Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah harus belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut.

Ada sebuah paradoks bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di suatu daerah terkadang tidak berjalan seiringan. Sebagai contoh, di Kabupaten Banggai dengan sektor unggulan migas, kenaikan pertumbuhannya

mencapai 36%, tetapi kemiskinan di sana juga masih tinggi dan mencapai lebih dari 14%. Untuk mengatasi hal tersebut, Wakil Presiden menyarankan agar setiap daerah dapat menggerakkan industri hilir. Sebagai ilustrasi, jika suatu daerah hanya menghasilkan gas maka bisa dikatakan sebagai *capital intensive* karena yang bekerja tidak banyak sehingga tidak “menetes” ke bawah, atau *trickle down effect* tidak terjadi, karena tidak disiapkan industri hilirnya. Negara Tiongkok dapat dijadikan contoh karena memiliki banyak industri hilir. Dengan semakin banyaknya industri hilir maka akan semakin banyak terbuka lapangan kerja untuk masyarakat sehingga daya beli masyarakat di daerah tersebut pun akan meningkat.

Terkait dengan pergeseran fokus pemerintah dari daerah ke desa, Wakil Presiden menyoroti soal perubahan sistem yang terkadang menjadi hambatan. “Setiap perubahan sistem selalu memerlukan waktu untuk belajar, tidak mungkin dalam satu hingga dua tahun langsung nampak keberhasilannya,” urai Wakil Presiden. Contoh nyata adalah ketika masa-masa awal penerapan sistem otonomi daerah, butuh beberapa tahun untuk penyesuaian. “Ketika nantinya diterapkan, pasti ada sebagian yang berhasil dan sebagian lagi tidak berhasil. Mudah-mudahan waktu belajarnya cukup 2–3 tahun, dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga,” lanjut Wakil Presiden. Namun, Wakil Presiden kembali mengungkapkan jika penguasaan sistem baru terkadang cukup rumit sehingga perlu berhati-hati dalam penerapannya.

Keberhasilan dan kemajuan suatu daerah tidak bisa dilepaskan juga dari perencanaan pembangunan yang baik. Saat ini, perencanaan di pemerintahan Indonesia menggunakan sistem *bottom-up*, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Wakil Presiden berpesan kepada para perencana untuk selalu disiplin menjalankan hasil Musrenbang serta pakem-pakem pembangunan yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai panduan/jalur dalam membuat perencanaan. “Dulu kita punya program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang memiliki target-target tertentu setiap periodenya.

Dengan disiplin mengikuti alur pencapaian, kita bisa tumbuh 7% hingga 8% pada waktu itu,” ujar Wakil Presiden memberikan gambaran.

Lebih lanjut, Wakil Presiden memaparkan bahwa saat ini sistemnya berbeda, perencanaan dilakukan oleh Presiden/pemerintah sendiri. Terkadang terjadi ketidakselarasan dengan perencanaan dari presiden/pemerintah periode sebelumnya ataupun sesudahnya. Walaupun programnya sama, terkadang namanya saja yang dibuat berbeda. Wakil Presiden memberikan contoh pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu ada MP3EI, yang sebenarnya sama saja dengan sistem perencanaan pembangunan pada masa presiden sekarang.

“Untuk menyambung program-program yang sama dengan nama yang berbeda tersebut, diperlukan konsistensi dalam implementasi serta pengendaliannya,” jelas Wakil Presiden. Di sini peran Bappenas diperlukan. Bappenas yang akan membuat perencanaan sekaligus memantau pelaksanaannya sesuai dengan rencana jangka panjang dan pencapaian target-targetnya. Hal ini juga

menjadi solusi bagi kelemahan perencanaan dengan sistem *bottom-up* yang sangat bergantung dari kesungguhan daerah sehingga seringkali sulit untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah. Wakil Presiden menyarankan agar penerapan sistem *bottom-up* sebaiknya diiringi dengan koridor kebijakan yang ingin dicapai.

Beberapa penjelasan di atas lebih berkaitan dengan alur publik. Ketika ditanya mengenai alur privat, Wakil Presiden menyebutkan bahwa alur privat lebih kepada pasar, yang akan berbicara dahulu mengenai kebutuhan pada masa yang akan datang. Meskipun demikian, pemerintah tetap dapat memberikan arah sesuai dengan kebutuhan sektor privat. Wakil Presiden juga mengutarakan optimistismenya terhadap perencanaan pembangunan ke depannya. Namun, optimisme tersebut juga harus terukur. Dari sisi ekonomi, ukuran tersebut dapat diamati dari penetapan target pertumbuhan ekonomi. “Kalau sekarang tumbuh 5% dan yang kita rencanakan dalam Nawacita tumbuh 7%, berarti masih perlu perjuangan berat dan serius untuk mencapainya,” ujar Wakil Presiden menutup perbincangan. ■



▲ Peran Bappenas diperlukan untuk menyambung dan mengendalikan implementasi program-program dari setiap periode pemerintahan.
Foto: www.nasionalisrakyatmerdeka.wordpress.com

ALEX NOERDIN

Gubernur Sumatra Selatan

Inovasi untuk Sumatera Selatan yang Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing Internasional

Provinsi Sumatera Selatan merupakan pemenang ke-3 Anugerah Pangripta Nusantara 2017 untuk kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik. Sebanyak 12 kriteria harus dipenuhi untuk menjadi yang terbaik. Dalam kesempatan wawancara dengan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, SIMPUL ingin menelusuri langkah-langkah yang telah dilakukan sang kepala daerah hingga membawa daerah yang dipimpinnya mampu meraih prestasi tersebut.

“...dalam membangun Sumatera Selatan, kami tidak hanya dituntut untuk berlari, tetapi harus melompat.”

SIMPUL (S): *Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan dalam menerjemahkan visi dan misi pembangunan dari kepala daerah?*

Alex Noerdin (A): Visi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2018 adalah “Sumatra Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam empat misi, yaitu (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) memantapkan stabilitas daerah; (3) meningkatkan pemerataan yang

berkeadilan; serta (4) meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana.

Adapun prioritas pembangunan dalam periode 2013–2018 tersebut adalah “Percepatan dan Perluasan”. Upaya-upaya percepatan dan perluasan pembangunan difokuskan pada 8 prioritas pembangunan amanat RPJMD yaitu (1) pembangunan pertanian; (2) investasi dan pengembangan usaha; (3) infrastruktur dan energi; (4) tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); (5) pendidikan, kesehatan dan sosial budaya; (6) penanggulangan kemiskinan; (7) pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana; serta (8) pengembangan wilayah.

Pada setiap tahun perencanaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Prioritas Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya dan tahun berjalan, target tahun berikutnya, amanat RPJMD, target Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta mempertimbangkan situasi terkini (seperti pada tahun ini ada penugasan pemerintah pusat bahwa Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games XVIII tahun 2018).

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka proses perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan disusun telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran terpadu (*e-planning*). Pada aplikasi tersebut program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan telah disusun berdasarkan RPJMD.

S: Apa latar belakang kreativitas dan inovasi yang dijalankan di Sumatra Selatan?

A: Sebagai kepala daerah, saya harus berpikir visioner. Pada awal saya menjadi gubernur, saya melihat Sumatra Selatan memiliki banyak potensi yang belum dikembangkan secara maksimal. Banyak hal yang bisa dilakukan bagi masyarakat Sumatra Selatan. Namun, bila dilakukan secara “*business as usual*”, perkembangan pembangunan tersebut akan berjalan lambat karena APBD kita tidak besar dibandingkan provinsi besar lainnya. Padahal dalam membangun Sumatra Selatan, kami tidak hanya dituntut untuk berlari, tetapi harus melompat. Kemudian saya mengajak seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Sumatra Selatan untuk belajar, bekerja keras, kreatif, berpikir jauh ke depan, dan terus melakukan inovasi. Sebaliknya, saya berusaha objektif dalam memilih sumber daya manusia untuk menjadi Kepala OPD. Hanya yang mampu dan mempunyai keunggulan yang saya beri kepercayaan.

“Banyak hal yang bisa dilakukan bagi masyarakat Sumatra Selatan. Namun, bila dilakukan secara “*business as usual*”, perkembangan pembangunan tersebut akan berjalan lambat.”

S: Apa target dan prioritas dalam pembangunan di Sumatra Selatan dikaitkan dengan masa jabatan seorang kepala daerah (maksimal 10 tahun)?

A: Sebagai kepala daerah, target dan prioritas saya telah saya sampaikan pada janji kampanye yang telah diterjemahkan pada RPJMD Provinsi Sumatra Selatan 2008–2013 dan 2013–2018. Target dan prioritas 2013–2018 sesuai dengan visi kami

yaitu “Sumatra Selatan Sejahtera, Lebih Maju, dan Berdaya Saing Internasional”. Untuk sejahtera, masyarakat harus mendapat pendidikan yang layak, walaupun sakit bisa berobat dengan gratis dan mempunyai pekerjaan tetap. Tiga hal tersebut menjadi fokus utama saya sebagai landasan untuk lebih maju dan berdaya saing internasional.

S: Bagaimana hasilnya sampai saat ini?

A: Pada awal jabatan menjadi gubernur pada tahun 2008, kami menerapkan program sekolah dan pengobatan gratis. Program tersebut menjadi pelopor dan terus mengalami penyempurnaan demi kesejahteraan masyarakat. Khusus untuk sekolah, mulai tahun 2015, kami telah menerapkan program kuliah gratis. Begitu juga dengan program dan kebijakan lainnya.

Dalam konstelasi nasional, Sumatra Selatan kini boleh berbangga karena di antara provinsi besar lainnya di Indonesia, kami mampu dan berhasil menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berkelas internasional, terutama di bidang olahraga. Tidak hanya di bidang olahraga, Sumatra Selatan juga dapat memberikan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut membuktikan bahwa Sumatra Selatan memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk bersaing tidak hanya di level nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan tidak hanya berfokus pada kegiatan berkelas internasional. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Sumatra Selatan tetap menjadi tujuan utama.

Secara makro, target dan capaian pembangunan tahun 2016 di antaranya peningkatan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,03% di atas angka nasional, nilai inflasi yang mampu ditekan hingga 2,95% di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,31%, serta nilai indeks gini (indeks kesenjangan ekonomi) yang lebih

▼ Sekolah gratis, salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Foto: www.secpalembang.blogspot.com
(sianakdesa photography)



baik dari capaian indeks gini nasional, yaitu 0,348. Selain itu, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan pada September 2016 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, meskipun masih di atas angka nasional.

Pemerintah Sumatera Selatan terus berusaha untuk mengurangi beban masyarakat melalui berbagai program seperti sekolah gratis, kuliah gratis, pengobatan gratis, pembangunan rumah sakit pratama, pemberian bantuan bibit tanaman, ternak, ikan, peralatan atau mesin-mesin untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), program-program pemberdayaan masyarakat lainnya, serta upaya-upaya ekonomi kerakyatan melalui OPD Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menggulirkan program “Gertak Sejuta Mandiri”, untuk mengoptimalkan program-program pengentasan kemiskinan bersama seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, *non-governmental organization* (NGO), dan *stakeholder* lainnya berbasis satu data dan satu peta kemiskinan.

Pencapaian beberapa indikator makro tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Selatan membangun secara inklusif bukan eksklusif. Artinya, hasil-hasil pembangunan di Sumatera Selatan tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, tetapi seluruh masyarakat dari segala lapisan.

S: Apa yang membedakan dengan daerah lain?

A: Tentu Sumatera Selatan berbeda bila dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang menerima Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Terbaik I dan II, kondisi Sumatera Selatan beda. DIY dan DKI Jakarta adalah otonomi khusus sehingga mempunyai banyak kekhususan. DKI Jakarta, misalnya, dengan otonomi tunggal maka mempunyai kewenangan untuk mengatur, membangun, membiayai dari level provinsi sampai dengan kelurahan dengan satu komando dan satu APBD.

Kami adalah daerah otonomi, dengan kabupaten/kota mempunyai bupati/walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat di wilayahnya dan telah menetapkan visi, misi, dan janji kampanyenya. Ini menjadi tantangan dan seni tersendiri untuk kami dalam menyinergikan program dan anggaran yang tersebar di provinsi dan kabupaten/kota. Jadi dapat dikatakan bahwa Sumatera Selatan menerima APN Terbaik III ini mewakili daerah otonomi lainnya. Seharusnya APN dipertandingkan pada kelompok yang sama, tidak digabung dengan daerah yang mempunyai kekhususan. Ini merupakan saran kami saja. APBD Sumatera Selatan mungkin masih kalah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Namun, semangat, motivasi, dan keinginan untuk maju membangun daerah kami sangat tinggi.

Kami ingin visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013–2018 terwujud. Untuk itu kami terus berusaha, belajar, bekerja keras, dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang serta

selalu membuat terobosan. Kami juga tidak lelah berkoordinasi, melakukan promosi, dan meminta bantuan dari pemerintah pusat agar program-program kami mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Hal tersebut kami lakukan karena dana yang kami miliki terbatas, tetapi program yang ingin dilaksanakan banyak.

Dalam mengatasi masalah, kami juga selalu aktif bekerja sama, berkoordinasi, dan bersinergi dengan seluruh *stakeholders* terkait. Sebagai contoh, pada tahun 2015, kami mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta asap. Musibah ini benar-benar mengganggu aktivitas di Sumatra Selatan. Saya sebagai Gubernur langsung turun dan mengajak semua pihak untuk mengatasi dan mengembalikan kelestarian hutan. Semua pihak yang terkait seperti aparat keamanan, aparat pemerintahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan yang terlibat, serta mitra internasional. Mereka bekerja setiap hari untuk mengawasi titik-titik api, sehingga pada tahun 2016 lebih aman.

S: *Apakah ada hambatan dan kendala di dalam sistem birokrasi, legislatif, atau dari masyarakat dalam menjalankan kebijakan pembangunan di Sumatra Selatan?*

A: Hambatan itu ada, tetapi sangat kecil jika dibandingkan dukungan dan sinergi yang terjadi. Pada umumnya kebijakan pembangunan di Sumatra Selatan didukung oleh kabupaten/kota, baik dari birokrasi, legislatif, maupun masyarakat. Contohnya program sekolah gratis dan pengobatan gratis yang merupakan sinergi dari dana kabupaten/kota dan provinsi untuk membantu masyarakat Sumatra Selatan.

S: *Bagaimana mengatasi kendala tersebut?*

A: Pada awal proses perencanaan, kami menyusun arah kebijakan pembangunan tahun yang akan datang. Arah kebijakan tersebut saya paparkan secara langsung dengan mengundang para *stakeholder* terkait seperti bupati/walikota se-Sumatra Selatan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD), akademisi, seluruh kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, dan unsur terkait lainnya. Pada saat arah kebijakan tersebut terjadi komunikasi dua arah, kami memaparkan dan juga menerima saran masukan yang membangun.

Selain itu, pada saat Konsultasi Publik dan Musrenbang, diskusi dan komunikasi tersebut tetap berlanjut sehingga semua pihak yang terkait merasa memiliki atas semua kebijakan yang diambil. Kebijakan pembangunan yang kami lakukan tentunya sudah dipertimbangkan untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatra Selatan.

Dengan pendekatan dan penjelasan secara komprehensif, saya mengajak segenap kekuatan pembangunan di Provinsi Sumatra Selatan dari berbagai kalangan profesi, baik sebagai pimpinan lembaga, birokrat pemerintahan, lembaga legislatif, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain untuk membulatkan tekad dan semangat bekerja keras dan berkarya lebih baik serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian demi mencapai prestasi terbaik untuk mewujudkan Sumatra Selatan menjadi provinsi yang sejahtera, maju, dan berdaya saing internasional.

S: *Apa rencana pembangunan yang belum dan akan dilaksanakan dalam sisa kepemimpinan Anda ke depan? Bagaimana juga harapan bagi penerus selanjutnya?*

A: Provinsi Sumatra Selatan pada saat ini memiliki 13 proyek strategis nasional di antaranya pembangunan Bendungan Tigadihaji di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Pelabuhan Tanjung Carat, Institut Olahraga Indonesia, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sumatra Selatan, jalan tol Palindra, jalan tol Pematang Panggang–Kayu Agung, jalan tol Palembang–Tanjung Api-Api, jalan tol Kayu Agung–Palembang–Betung, jalur kereta api (KA) Prabumulih–Kertapati, jalur KA Simpang–Tanjung Api-Api, jalur KA Tanjung Enim–Tanjung Api-Api, jalur KA Palembang–Jambi, serta jalur *light rail transit* (LRT).

Pembangunan fasilitas penunjang Asian Games 2018, pembangunan KEK Tanjung Api-Api, hingga berbagai proyek prioritas nasional di Sumatra Selatan lainnya telah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2018 Provinsi Sumatra Selatan memiliki sepuluh prioritas daerah yaitu (1) provinsi olahraga; (2) pembangunan lingkungan berbasis lanskap; (3) peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pariwisata; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) infrastruktur dan konektivitas; (6) pendidikan berkualitas, (7) kesehatan untuk semua; (8) perumahan dan pemukiman; (9) stabilitas keamanan dan ketertiban; serta (10) kedaulatan pangan.

Pada tahun 2018, kepemimpinan saya akan berakhir. Sepuluh prioritas daerah tersebut akan menjadi fokus pada akhir masa jabatan. Saya tentunya berharap berbagai hal yang telah dilakukan dan dicapai selama kepemimpinan saya dapat diteruskan dan ditingkatkan oleh penerus selanjutnya.

Saya berharap Provinsi Sumatra Selatan dapat eksis dan semakin terkenal di dunia internasional dengan berbagai capaian. Saya juga berharap agar Sumatra Selatan selalu menjadi ikon provinsi olahraga dengan menjaga, memanfaatkan fasilitas olahraga secara berkelanjutan, bahkan terus melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung olahraga. Ikon Provinsi Olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Sumatra Selatan.

S: Apakah ada keterkaitan dan pengaruh dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan terkait ditunjuknya Provinsi Sumatra Selatan sebagai salah satu lokasi tuan rumah SEA Games yang lalu dan Asian Games 2018?

A: Sejak SEA Games 2011 hingga tahun 2017 ini telah ada 39 kegiatan internasional yang dilaksanakan di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang. Fasilitas olahraga di Kompleks Olahraga Jakabaring terus bertambah, terpelihara, dan semakin baik.

Foto: www.beritadaerah.co.id



▲ Kompleks Olahraga Jakabaring Sport City terus dikembangkan guna menghadapi ajang Asian Games 2018.

Terhadap kepercayaan Pemerintah Pusat yang menunjuk Sumatra Selatan sebagai salah satu tuan rumah Asian Games 2018, tentunya mempunyai pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 2018, isu dan prioritas pertama Provinsi Sumatra Selatan dalam RKPD Tahun 2018 adalah provinsi olahraga. Itu menunjukkan keseriusan dan semangat Sumatra Selatan dalam berupaya menyukseskan Asian Games 2018.

Berbagai hal telah kami siapkan antara lain rumah sakit berstandar Internasional, infrastruktur pendukung dibangun dengan baik, bandara, jalan tol, LRT, pelabuhan dan lain-lain. Menurut kami dan berbagai pihak yang telah meninjau ke lapangan, persiapan Provinsi Sumatra Selatan dalam mempersiapkan Asian Games 2018 jauh lebih baik, namun sejatinya Asian Games ini bukan tujuan akhir. Hal tersebut hanya sebagai perantara untuk mencapai peningkatan kelengkapan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan di Sumatra Selatan.

Dengan ditunjukannya Sumatra Selatan sebagai tuan rumah Asian Games berarti Sumatra Selatan memenuhi standar internasional, minimal Asia baik untuk infrastuktur, maupun keamanannya sehingga Saya berharap ini sebagai modal Sumatra Selatan untuk menerima kepercayaan para investor asing dan nasional untuk investasi di Sumatra Selatan. ■



MUZAKIR SAI SOHAR

Bupati Muara Enim

Tujuh Inovasi Perencanaan untuk Mewujudkan Tujuh Program Prioritas

Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan merupakan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara 2017 untuk kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan. Dalam sebuah sesi wawancara, SIMPUL ingin menggali lebih dalam langkah-langkah yang telah dilakukan Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, sehingga menjadikan wilayahnya memiliki perencanaan yang paling inovatif dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“...inovasi merupakan kebutuhan, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi aparatur pemerintah yang ingin sukses.”

SIMPUL (S): *Bagaimana proses inovasi perencanaan pembangunan di Muara Enim?*

Muzakir Sai Sohar (M): Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki tantangan besar untuk membangun daerah dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Di satu sisi Kabupaten Muara Enim memiliki banyak peluang dan sumber daya, termasuk anggaran. Namun di sisi lain, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik juga semakin tinggi. Kami berupaya maksimal secara terus menerus menciptakan suatu inovasi yang berguna bagi masyarakat banyak.

Kondisi ini semakin terpacu dengan ditetapkannya Kabupaten Muara Enim sebagai *pilot project* Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013.

Selain itu, Kabupaten Muara Enim juga telah ditetapkan sebagai *pilot project* Laboratorium Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 32/K.1/HKM.03.01 tanggal 10 Februari 2015.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memandang baik rencana inovasi daerah yang pada prinsipnya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kepuasan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga memberikan peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk daerah, masyarakat, nusa, dan bangsa.

Ada tiga hal yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertekad mengembangkan inovasi daerah. Pertama, inovasi merupakan kebutuhan, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi aparatur pemerintah yang ingin sukses. Kedua, hanya pemerintah daerah yang senantiasa berinovasi yang akan mampu bertahan (*survive*) dan mampu bersaing. Ketiga, dengan berinovasi, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan akan tuntutan pelayanan publik dan hasil pembangunan yang senantiasa berkembang bersamaan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

S: *Apa saja inovasi yang dilakukan dalam perencanaan kebijakan, inovasi proses, dan program daerah sehingga diakui oleh Bappenas?*

M: Salah satu upaya yang dilakukan Kabupaten Muara Enim dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah, yaitu melalui inovasi daerah. Dalam proses tersebut Kabupaten Muara Enim telah menjalankan banyak inovasi. Dari beberapa inovasi tersebut, terdapat tujuh inovasi unggulan yang terbagi menjadi tiga kategori.

Kategori pertama adalah inovasi kebijakan yang terdiri atas dua program, yaitu Gerakan Pengembangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (Gerbang Serasan) dan Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Pola Musrenbang.

Kategori kedua adalah inovasi proses, yang terdiri atas dua program, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan Daerah (Simdalbangda) dan *Knowledge Management System*.

Kategori ketiga adalah inovasi program dengan tiga program, yaitu Amnesti Tangki Septik Bocor, Rumah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) Gerbang Serasan, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan (Penguat Pak Camat).

Selain ketujuh inovasi unggulan tersebut, terdapat inovasi kebijakan lain yang cukup menonjol, yaitu diterbitkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKPD Non-APBD).

S: Apa yang memengaruhi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim?

M: Proses perencanaan tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun dari eksternal (seperti kinerja pemerintah, dukungan legislatif, serta peran masyarakat, akademisi, dan dunia usaha). Tentu saja dalam pelaksanaannya timbul beragam permasalahan. Namun, yang lebih penting dari itu adalah sinergi semua pemangku kepentingan dapat terpenuhi dan permasalahan-permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik.

S: Apa target dan prioritas dalam pembangunan di Muara Enim sehingga bisa melahirkan inovasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan?

M: Sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2013–2018, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sehat,

mandiri, agamis, dan sejahtera di Bumi Serasan Sekundang. Visi tersebut kemudian dirumuskan melalui lima misi: (1) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (2) melaksanakan reformasi birokrasi; (3) meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal; (4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan (5) peningkatan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Muara Enim adalah (1) penanggulangan kemiskinan; (2) penguatan ketahanan pangan; (3) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur; (4) penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan manusia; (5) pemantapan reformasi birokrasi; (6) pembangunan pedesaan; dan (7) pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Selanjutnya, terdapat 39 target indikator sasaran yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2013–2018.

S: Bagaimana target dan prioritas pembangunan di Kabupaten Muara Enim dikaitkan dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah?

M: Dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah, tahun 2017 ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Jika memperhatikan aspek target dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD, kami yakin bahwa capaian target dan prioritas pembangunan semuanya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2016, Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja, secara umum telah berhasil direalisasikan sebesar 120,27%. Dari total 39 indikator kinerja, 20 indikator telah terealisasi melebihi 100%, 15 indikator terealisasi 85% sampai dengan 100%, dan 4 indikator masih terealisasi di bawah 85%.

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim, beberapa keberhasilan yang dicapai antara lain Angka Kemiskinan tahun 2016 sebesar 13,56% mengalami penurunan dari 14,54% pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 meningkat menjadi 66,71% dari 65,82% pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2015 sebesar 94,68%, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 58,61%, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 sebesar 81,46% melebihi angka Provinsi Sumatera Selatan 79,81% maupun angka nasional 72,82%, dan lain-lain.

S: Apa harapan bagi penerus selanjutnya?

M: Kepada siapapun yang kelak terpilih sebagai Bupati Muara Enim, tentunya saya berharap agar dapat mempertahankan semua pencapaian yang telah kami raih dengan usaha dan kerja keras bersama selama ini. Kami telah mampu meraih Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2015 dan tahun 2017; Anugerah Pangripta Sriwijaya tahun 2014, 2015, dan 2017; penghargaan Adipura yang ke-12 secara berturut-turut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017; penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai B; dan prestasi-prestasi lainnya.

S: Apa yang membedakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan daerah lain?

M: Kabupaten Muara Enim mempunyai komitmen yang kuat dari Bupati sampai ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan inovasi daerah yang telah dibuat, kemudian secara bersama-sama mendukung dan melaksanakan inovasi tersebut. Kami juga senantiasa memantau dan mengevaluasi hasil implementasi yang telah dilakukan termasuk upaya replikasinya.

S: Apakah ada hambatan dalam menjalankan kebijakan pembangunan di Muara Enim?

M: Ada beberapa hambatan yang kami alami seperti permintaan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat pada saat kondisi anggaran terbatas dan masih banyak lagi. Namun, permasalahan tersebut dapat dipecahkan salah satunya melalui inovasi daerah. Usulan pembangunan yang banyak dan membutuhkan anggaran yang besar melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diselesaikan melalui inovasi CSR-PKBL (peran serta dunia usaha) dan peran serta masyarakat. Sementara itu, permasalahan permodalan UMKMK dapat teratasi melalui inovasi Gerbang Serasan.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga berusaha secara optimal mencari sumber pendapatan lainnya, baik melalui APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun dengan cara menarik para investor, baik lokal maupun asing, untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim.

S: Bagaimana pelaksanaan inovasi perencanaan pembangunan di lapangan?

M: Pelaksanaan inovasi perencanaan pembangunan di daerah sangat membantu dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dan mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Inovasi perencanaan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

SP: Bagaimana bentuk dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) atau sumber lainnya?

M: Pemerintah Kabupaten Muara Enim selalu berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Peningkatan SDM juga menjadi perhatian khusus melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, *workshop*, seminar dan lain-lainnya. Saya pun telah menetapkan anggaran diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sebesar 2% dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Muara Enim setiap tahunnya. ■

MARSELINUS Y.W. PETU

Bupati Ende

Pembangunan Harus Dimulai dari Desa dan Kelurahan

Ende terletak paling tengah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2017, Kabupaten Ende meraih prestasi nasional dengan mendapatkan Anugerah Pangripta Nusantara sebagai Kabupaten dengan Perencanaan Pembangunan Terbaik ke-2. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga meraih prestasi tersebut? Berikut penjelasan Bupati Ende, Marselinus Y. W. Petu kepada SIMPUL.

“...ketika saya membangun desa maka dengan sendirinya itu adalah membangun kabupaten...”

SIMPUL (S): *Terkait dengan keberhasilan Ende meraih Anugerah Pangripta Nusantara, apa saja yang sudah dilakukan ketika Anda menjabat sebagai bupati?*

Marselinus Y. W. Petu (M): Pertama, saya selalu berpikir bahwa negara harus memiliki karakter dan negara harus kuat terutama dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan era pasar bebas saat ini. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki karakter. Oleh karena itu, saya harus membangun karakter sehingga bangsa ini menjadi kuat. Lalu, bagaimana mewujudkan karakteristik di daerah Ende? Ada dua karakteristik yang dapat diangkat, yaitu karakteristik wilayah dalam hal ini lahan dan karakteristik manusianya sebagai pelaku, pengguna, dan penerima manfaat.

Pada awal memimpin, saya menyampaikan kepada teman-teman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera melakukan survei untuk menyusun peta kesesuaiannya yang kemudian dilegalkan dengan Keputusan Bupati atau bahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hasil pemetaan menjadi parameter sekaligus dasar bagi kami dalam membuat perencanaan daerah ke depan, baik dari sisi lahan maupun manusianya, sesuai karakter yang ada.

Kedua, saya berpikir komunitas terkecil dalam konteks hierarki pemerintah adalah desa. Oleh karena itu, desa adalah desa kabupaten dan kabupaten adalah kabupatennya desa. Ketika saya membangun desa maka dengan sendirinya saya membangun kabupaten. Desa maju, kabupaten pun maju. Karakter yang berbeda dibangun dan diwujudkan dengan membangun mulai dari desa dan kelurahan sebagai basis komunitas masyarakat terkecil dalam konteks hierarki pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan visi saya, yaitu "Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan".

S: Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut?

M: Saya menyusun strategi untuk mewujudkannya, yaitu melalui optimalisasi peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini dikenal dengan model Segitiga Membangun Kabupaten Ende, yaitu segitiga pendekatan, segitiga kemitraan dan segitiga kekuatan bekerja.

Pertama, Segitiga Pendekatan merupakan kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

pembangunan antara DPRD selaku legislatif, pemerintah selaku eksekutif, dan masyarakat selaku *stakeholders*. Penguatan pada strategi ini dilakukan melalui pendekatan, baik formal maupun informal, melalui dialog yang setara dan seimbang antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD.

Yang kedua adalah Segitiga Kemitraan (*triparted*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena ketiga kelembagaan itu memiliki fungsi-fungsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pemegang hak politik, dan yudikatif yang berwenang dalam hukum politik.

Strategi yang terakhir adalah Segitiga Kekuatan Bekerja. Dalam istilah kami, pembangunan dilakukan dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada, yang dikenal dengan *Tiga Batu Tungku* atau *Lika Mboko Telu*, yaitu pemerintah, agama, dan adat atau budaya. Bangsa yang kuat juga merupakan bangsa yang berbudaya. Di Ende, adat harus dipertahankan. Sebagai pemerintah, kami tidak bisa bekerja sendirian dan harus bekerja bersama dengan agama dan adat. Dengan pemikiran bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, agama bekerja untuk umat, dan adat bekerja untuk penggarap (*fai walu ana kalo*). Rakyat, umat, dan penggarap sebetulnya satu kesatuan yang komponen besarnya adalah masyarakat Kabupaten Ende.

Dari ketiga komponen itu, orang bekerja dengan orang/komponen yang sama untuk mewujudkan karakteristik dengan membangun mulai dari desa dan kelurahan.

S: Selanjutnya bagaimana?

M: Implementasi strategi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan pelaksanaan pembangunan. Saya memandang perlu untuk mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih berperan aktif. Tahun 2016, saya tetapkan sebagai tonggak kelahiran baru menuju perubahan. Ini semacam *spirit* membangun Ende untuk NTT Baru dan Indonesia Hebat. Ende

diletakkan dalam bingkai Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saya tanamkan "Tiga *Spirit* dalam Bekerja" kepada seluruh ASN, yaitu inovasi, desentralisasi, dan kolaborasi. Pemerintah harus ada inovasi serta melakukan desentralisasi dan kolaborasi. Kami harus melakukan perubahan dan perubahan akan terjadi apabila ada inovasi. Setelah itu, kami tinggal mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang ada, baik itu di dalam unit kerja maupun desentralisasi pemerintah kabupaten dengan kecamatan dan desa/kelurahan sesuai dengan hierarki pemerintah. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan cara bekerja bersama-sama dan sama sama bekerja sehingga tidak ada lagi ego sektoral dan tidak ada lagi *super power* di dalam demokrasi, yang ada hanyalah sebuah kebersamaan.

Berkaitan dengan posisi perencana, visi dan misi saya dan Wakil Bupati Ende telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014–2019 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 dan dijabarkan seluruh perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra). RPJMD ini menjadi acuan dalam perencanaan beberapa program-program prioritas/program-program strategis. Sesuai regulasi, RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dokumen-dokumen perencanaan ini harus kami jaga konsistensinya.

S: Apa saja inovasi yang dilakukan di Ende?

M: Inovasi yang kami lakukan ada dua, yaitu inovasi program pembangunan dan inovasi proses perencanaan. Pada tataran program pembangunan, pertama sekali kami menekankan pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun karakteristik pendidikan didasarkan budaya dan adat istiadat di Ende yang merupakan "nenek moyang" kami. Program utama saya di bidang pendidikan adalah pembangunan

asrama (*mess*) guru untuk wilayah terpencil, selain program utama lain yang diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas guru dan sarana-prasarana pendidikan.

S: Bagaimana dengan pembangunan dalam bidang lain?

M: Untuk bidang kesehatan, kami ingin masyarakat Ende kuat jiwa dan raganya. Masyarakat Ende tidak boleh sakit, kalau pun sakit harus sembuh dan tidak boleh meninggal. Untuk itu, kami akan bekerja keras. Kami memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan kelayakan sarana-prasarana kesehatan yang menjangkau 278 desa dan kelurahan.

Untuk sektor ekonomi, dirumuskan enam sektor yang menjadi karakteristik nenek moyang kami, yaitu (1) pertanian; (2) perkebunan dan kehutanan; (3) peternakan; (4) kelautan dan perikanan; (5) perdagangan dan industri usaha kecil, mikro, menengah; serta (6) pariwisata dan lingkungan hidup. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, pertama-tama saya ingin memastikan pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, yaitu jalan yang bagus, cukup ketersediaan air bersih, dan listrik.

Saya mendorong juga pembangunan lima jalan paralel yang menghubungkan jalur tengah, yaitu jalan nasional lintas Flores dengan jalur utara wilayah Kabupaten Ende. Ini sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada infrastruktur dan investasi.

Pada sisi pemberdayaan masyarakat, saya mendorong tumbuh kembangnya partisipasi. Ini juga merupakan inovasi utama dalam proses perencanaan yang kami lakukan, yaitu partisipasi dalam perencanaan melalui kebijakan Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (Pides/Pikel).

Saya juga punya program Seling Saling singkatan dari Selasa Keliling dan Sabtu Keliling, berupa dialog dan audiensi dengan masyarakat dan para tokoh; semacam blusukan ala Presiden Jokowi.

Keseluruhan Program Pembangunan prioritas, kami kemas dalam istilah Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3D&K).

S: Kira-kira dari inovasi program pembangunan, bisakah disebutkan kegiatan nyata tahunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ende?

M: Setiap tahun beberapa kegiatan besar yang kami lakukan, selain beberapa kegiatan rutin terkait penyelegaraan pemerintahan, antara lain Parade Kebangsaan untuk peringatan hari lahir Pancasila, Festival Danau Kelimutu, dan pertemuan dengan seluruh tokoh agama dan tokoh adat.

S: Apa hal baru yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende?

M: Inovasi baru dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende dan mungkin belum banyak dilakukan daerah lain adalah Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (Pides/Pikel). Pides/Pikel memberi solusi terkait keengganan masyarakat untuk mengikuti proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Saya memastikan kuota anggaran untuk masing-masing desa dan kelurahan, berkisar antara 700 juta–1 miliar rupiah (tidak termasuk dana desa). Dengan alokasi ini, setiap desa dan kelurahan dapat merumuskan permasalahan dan menyampaikan usulan dalam proses Musrenbang dari dusun, desa/kelurahan, kecamatan, forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan kabupaten. Usulan Pides/Pikel akan dilaksanakan OPD sesuai tugas dan fungsi.

Dengan konsep ini, pembangunan desa dan kelurahan bisa didorong lebih cepat, karena selain menggunakan swadaya, Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana desa yang dikelola desa sendiri, juga diperkuat oleh OPD Kabupaten melalui alokasi Pides/Pikel. Inovasi lain adalah Pagu Indikatif Kecamatan yang saya siapkan untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan setiap kecamatan dialokasikan 500 juta rupiah. ■



Kerja Sama Peningkatan Kapasitas ASN di Papua dan Papua Barat

Tanggal 3 Maret 2017 merupakan babak penting dan bersejarah bagi Pusbindiklatren Bappenas yang melakukan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua dan Papua Barat.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani bersama. Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan oleh Imron Bulkin selaku Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (pada saat itu) dengan Jacob Manusawai (Rektor Universitas Papua) dan Onesimus Sahuleka (Rektor Universitas Cenderawasih).

Dalam rangka menindaklanjuti NKB tersebut, pada tanggal 31 Juli 2017, Pusbindiklatren Bappenas juga melakukan kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di kedua provinsi tersebut. Kerja sama dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusbindiklatren dengan Bappeda Provinsi Papua dan Bappeda Provinsi Papua Barat. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf selaku Sekretaris Kementerian PPN/ Bappenas dengan Hery Dosiaen selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Nataniel D. Mandacan selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan kebutuhan



▲ Diklat PPD-RPJMD mengawali upaya Pusbindiklatren Bappenas untuk meningkatkan kapasitas ASN di Paupua dan Papua Barat

pendidikan dan pelatihan ASN untuk wilayah timur Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 2016. Adapun pemetaan kebutuhan tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi ASN, terutama di provinsi Papua dan Papua Barat, dalam beberapa program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Di dalam kesepakatan tersebut, Bappenas menunjuk Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih sebagai pelaksana kegiatan Diklat Gelar maupun Diklat Non-Gelar yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren. Kerja sama ini juga sejalan dengan kebijakan afirmasi (keberpihakan) yang digadagadang oleh Presiden Jokowi untuk membangun dari wilayah pinggiran. Pusbindiklatren Bappenas juga setuju bahwa seleksi administrasi calon peserta dari

Papua dan Papua Barat dilaksanakan oleh Bappeda. Hal ini bertujuan agar pemilihan calon peserta dapat disesuaikan kebutuhan instansi.

Sebagai implementasi awal dari penandatanganan kerja sama, telah dilaksanakan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD RPJMD) khusus Papua dan Papua Barat di Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih.

Melalui kerja sama diklat ini diharapkan kapasitas ASN di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat meningkat dan pada akhirnya kualitas perencanaan pembangunan di wilayah tersebut membaik sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. **(Penulis: Feita Puspita Murti/Pusbindiklatren Bappenas) ■**



Seleksi Penerimaan Program Beasiswa Pusbindiklatren 2017

Pada tahun 2016, Pusbindiklatren Bappenas kembali membuka program beasiswa untuk tahun akademik 2017/2018. Proses seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas untuk tahun 2017 telah dimulai sejak bulan Juli 2016. Proses seleksi tersebut terdiri atas seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik (TPA), dan *Test of English as a Foreign Language-Institutional Testing Program* (TOEFL-ITP).

PROSES PELAKSANAAN

Seperti proses beasiswa tahun sebelumnya, Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2017 dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang, yakni gelombang I yang dimulai sejak bulan Juli tahun 2016 dan gelombang II yang dimulai sejak bulan Januari 2017. Ujian TPA gelombang I telah dilaksanakan pada 22 Oktober 2016 bertempat di 15 kota seluruh Indonesia. Menyusul kemudian ujian TOEFL



▲ Pelaksanaan ujian TPA dan TOEFL di beberapa kota sebagai bagian dari tahapan seleksi Beasiswa Pusbindiklatren.

gelombang I yang dihelat pada 19 November 2016 bertempat di 9 kota seluruh Indonesia. Adapun ujian TPA dan TOEFL gelombang II diselenggarakan pada 11 Maret dan 8 April 2017.

Sebagai informasi, dalam pelaksanaan seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2017 juga dilaksanakan seleksi tambahan berupa seleksi wawancara dan seleksi *International English Language Testing System* (IELTS) untuk peserta yang mendaftar beasiswa program *linkage* Universitas Hasanuddin-Griffith University (Australia). Pelaksanaan seleksi wawancara dan IELTS gelombang I telah dilakukan pada tanggal 20–24 Januari 2017 bertempat di Gedung Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

JUMLAH PESERTA

Berdasarkan hasil seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2017, baik untuk gelombang I maupun gelombang II, dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang melakukan proses pendaftaran mencapai 3.237 peserta, dengan rincian 1.898 peserta di antaranya merupakan peserta berjenis kelamin laki-laki (59%) dan sisanya sejumlah 1.339 peserta (41%) merupakan peserta perempuan.

Dari jumlah peserta yang mendaftar, sekitar 1.405 peserta (43%) berasal dari instansi pemerintah pusat yang berada di Pulau Jawa. Sementara itu, peserta dari instansi pemerintah pusat yang berada di luar Pulau Jawa menjadi penyumbang paling sedikit dengan jumlah sekitar 391 peserta (12%). Masih dominannya jumlah peserta yang berasal dari instansi pusat tentunya menjadi masukan bagi Pusbindiklatren Bappenas untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi (*outreach*) Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas di daerah.

Dari hasil tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah peserta dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara meningkat dengan jumlah sekitar 30 peserta dari Provinsi Maluku dan 27 dari Provinsi Maluku Utara. Dengan meningkatnya jumlah peserta dari kedua provinsi tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan rintisan kerja sama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan kedua provinsi tersebut berjalan cukup baik.

PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI

Dari hasil jumlah peserta tersebut juga dapat diketahui bahwa 1.153 di antaranya masih belum memenuhi syarat administrasi, dengan rincian 755 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 398 peserta

berjenis kelamin perempuan. Cukup tingginya jumlah peserta yang masih belum memenuhi syarat administrasi dapat dikarenakan masalah usia, latar belakang pendidikan, maupun masa kerja yang belum mencukupi. Dari jumlah peserta yang belum memenuhi syarat tersebut, 538 peserta (47%) di antaranya berasal dari instansi pemerintah pusat yang berada di Pulau Jawa.

Dominasi peserta dari instansi pemerintah pusat yang berada di Pulau Jawa juga terlihat dari tingginya jumlah peserta dari wilayah/instansi tersebut yang memenuhi persyaratan administrasi hingga mencapai 871 peserta atau sekitar 42% dari keseluruhan peserta yang memenuhi persyaratan.

KELULUSAN CALON KARYASISWA

Setelah proses pelaksanaan ujian seleksi TPA dan TOEFL, jumlah peserta yang berhasil memenuhi persyaratan mencapai 548 peserta dengan rincian 261 peserta berjenis kelamin laki-laki dan 287 peserta berjenis kelamin perempuan. Peserta dari instansi kementerian pusat di Pulau Jawa masih mendominasi hingga 245 peserta (45%). Dari jumlah peserta yang memenuhi persyaratan tersebut, terdapat 450 calon karyasiswa yang berhasil ditempatkan dalam Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2017, dengan rincian 215 calon karyasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 235 calon karyasiswa berjenis kelamin perempuan.

Selain itu, diketahui juga bahwa mayoritas calon karyasiswa yang berhasil ditempatkan berasal dari instansi kementerian pusat yang berada di Pulau Jawa dengan jumlah mencapai 192 calon karyasiswa (43%). Jika jumlah ini dibandingkan dengan calon karyasiswa dari kategori lainnya, dapat diketahui bahwa perbandingan antara calon karyasiswa dari instansi daerah dengan instansi kementerian pusat yang berada di Pulau Jawa berada di kisaran 57% berbanding 43%.

Penempatan di Berbagai Program Studi
Berdasarkan hasil seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2017, sebanyak 115 karyasiswa berhasil ditempatkan dalam program *S2 Linkage*

Jepang. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung menjadi program studi dengan jumlah karyasiswa terbanyak, yaitu mencapai 16 karyasiswa. Sementara itu, Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia menjadi program studi dengan jumlah karyasiswa paling sedikit, yakni sebanyak 10 karyasiswa.

Dari jumlah 115 karyasiswa *S2 Linkage* Jepang 2017, dapat diketahui bahwa mayoritas karyasiswa berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan 51% berbanding 49%. Sementara itu, jika dilihat dari kategori instansi asal penerima Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, dapat diketahui bahwa karyasiswa yang berasal dari instansi pusat mencapai 66%.

Selain penempatan untuk program *S2 Linkage* Jepang, hasil seleksi juga berhasil menempatkan masing-masing 3 karyasiswa untuk program *S2* dan *S3* Luar Negeri Jepang, 7 karyasiswa untuk program *S3* Dalam Negeri, 10 karyasiswa untuk program *S2 Linkage* Australia dan 280 karyasiswa untuk program *S2* Dalam Negeri 2017.

Dari jumlah 280 karyasiswa tersebut, dapat diketahui bahwa program studi dari Universitas Gadjah Mada masih mendominasi tingkat popularitas dengan jumlah karyasiswa masing-masing mencapai 25 karyasiswa. Adapun program studi dari Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala menjadi program studi dengan jumlah karyasiswa paling sedikit.

Tidak meratanya jumlah karyasiswa pada berbagai program studi tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Pusbindiklatren Bappenas dan program studi agar sebaran karyasiswa semakin merata ke depannya yang diikuti dengan peningkatan kualitas prodi. **(Penulis: Reza Satrya Arjakusuma/ Pusbindiklatren Bappenas) ■**



Pelaksanaan

Magang Dalam Negeri 2017

Pusbindiklatren Bappenas

Pusbindiklatren Bappenas mengemban peran sebagai instansi yang memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana serta program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta bagi perencana pusat dan daerah melalui beasiswa.

Tugas Pusbindiklatren Bappenas tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan Diklat Gelar dan Diklat Non-Gelar melalui dukungan pembiayaan dari Pemerintah Jepang dan World



▲ Peserta magang sedang melakukan presentasi.

Bank. Salah satu dari penyelenggaraan Diklat Non-Gelar adalah program magang bagi para aparatur perencana daerah.

Program magang ini adalah program diklat non konvensional yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman dan *best practices* proses perencanaan dan koordinasi di Bappenas terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) perencana pusat dan daerah. Dengan kesempatan tersebut aparatur perencana dapat mendapatkan pengalaman bekerja dalam institusi yang terlibat langsung dengan proses perencanaan pembangunan nasional, bertukar informasi mengenai perencanaan di daerah dan di pusat, serta menjalin hubungan kerja (*networking*) antara aparatur perencana di pusat dengan daerah.

Melalui kegiatan magang ini diharapkan pengetahuan, keterampilan, dan interaksi antarperencana akan meningkat khususnya dalam mengintegrasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan perencanaan di pusat dan daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas institusi perencana.

Pada tahun 2017, program magang dalam negeri dilaksanakan selama tiga bulan mulai tanggal 29 Maret–16 Juni 2017. Program magang ini diikuti oleh enam peserta magang, yaitu Hendri Fajri, Firman Purnawan, Mayhayati, dan Rizky Rahmawati

(dari Bappeda Provinsi Riau); Indra Yadi Putera (dari Bappeda Kabupaten Aceh Singkil); dan Happy Risdian (dari Bappeda Kota Salatiga). Keenam peserta tersebut ditempatkan di empat direktorat di Bappenas, yaitu Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Direktorat Pendidikan dan Agama, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, dan Pusbindiklatren Bappenas.

Sebelum mengikuti magang di tiap-tiap unit kerja, peserta diberikan pembekalan mengenai Bappenas termasuk tugas dan fungsi unit kerja serta pengetahuan mengenai sistem dan prosedur pendanaan pembangunan. Peserta magang ditempatkan berdasarkan proposal yang disampaikan serta keterkaitan dengan tugas pekerjaan di instansi asal peserta. Selama tiga bulan mengikuti magang, peserta diharapkan dapat mendapatkan berbagai manfaat dan pembelajaran dari unit kerja tempat magang sehingga dapat diterapkan di instansi masing-masing.

Adapun keluaran dari program magang ini, peserta harus menghasilkan *action plan* untuk diterapkan di instansi masing-masing. Sebagai tugas akhir, peserta magang mengajukan *action plan*. Tema-tema yang diangkat peserta magang sebagai *action plan*, yaitu (1) Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah; (2) Strategi Memakai Dana Daerah dengan Mengusulkan Kegiatan Kawasan Strategis, yaitu Kawasan Duri, Dumai; (3) Model Pendanaan Luar Negeri untuk Daerah; (4) Penerangan Jalan Umum dengan Pembiayaan melalui Skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Kota Salatiga; dan (5) *Human Capital Development Plan* (HCDP) di Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.

(Penulis: Wiwit Kuswidiati/Pusbindiklatren Bappenas) ■



Workshop PAK-APAK Angkatan I Tahun 2017

Pada tanggal 15–19 Mei 2017 yang lalu, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas mengadakan *Workshop* Penilaian Angka Kredit (PAK) Perencana dan *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK) Perencana Angkatan I tahun 2017. Kegiatan ini bertempat di Hotel Royal, Jalan Ir. H. Juanda No. 16, Bogor. Pelaksanaan *Workshop* PAK berlangsung selama 5 (lima) hari, sedangkan *Workshop* APAK berlangsung selama 3 (tiga) hari.

WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA

Proses penilaian prestasi kerja ke dalam Angka Kredit dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit. Dengan demikian, fungsi Tim Penilai Angka Kredit adalah memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan perencana ke dalam angka kredit serta membantu tugas-tugas pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat perencana. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (SK Men-PAN), Tim Penilai Angka

Kredit terdiri atas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Dengan dikeluarkannya SK Men-PAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Angka Kreditnya maka pemerintah telah melakukan terobosan baru dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna para aparatur negara, khususnya yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan. Peningkatan daya guna dan hasil guna ini merupakan prestasi kerja perencana yang selanjutnya dalam sistem JFP diukur dengan besaran angka kredit.

Dalam rangka menjamin profesionalitas dan objektivitas Tim Penilai Angka Kredit, perlu dilakukan kegiatan *Workshop* PAK bagi anggota tim penilai maupun bagi para pejabat perencana yang berpotensi untuk menjadi anggota tim penilai di tingkat pusat, instansi, provinsi, maupun kabupaten/kota. *Workshop* PAK bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian, dan wawasan Tim Penilai Angka Kredit terhadap unsur-unsur kegiatan perencanaan dan penilaian angka kredit; (2) menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, maupun Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam kegiatan penilaian angka kredit; serta (3) meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan JFP bagi tim penilai dalam rangka pelaksanaan JFP.

Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan *Workshop* PAK, yaitu peserta dapat mengetahui/memahami/mengerti/melaksanakan tentang (1) kebijakan JFP; (2) kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN); (3) konsep dasar perencanaan pembangunan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (4) etika penilaian angka kredit perencana; (5) penilaian kegiatan perencanaan; (6) penilaian kegiatan pendidikan dan pengembangan profesi; (7) penilaian kegiatan penunjang; (8) organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit perencana; (9) penyusunan laporan penilaian kegiatan angka kredit

perencana; serta (10) melakukan kegiatan penilaian angka kredit perencana.

Materi *Workshop* PAK terdiri atas (1) Kebijakan JFP; (2) Kebijakan ASN; (3) Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan dan SPPN; (4) Etika Penilaian Angka Kredit; (5) Penilaian Kegiatan Perencanaan; (6) Penilaian Kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Profesi; (7) Penilaian Kegiatan Penunjang; serta (8) Pengertian dan Tujuan Organisasi Tim Penilai yang tiap-tiap materi dilaksanakan selama 5 jam pelajaran. Untuk materi terakhir dilakukan Studi Kasus yang dilaksanakan selama 8 jam pelajaran. Total waktu pembelajaran materi *workshop* mencapai 48 jam pelajaran.

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran *Workshop* PAK adalah ceramah di kelas, pendalaman materi, diskusi, praktik penilaian, dan simulasi. Total peserta yang mengikuti *Workshop* PAK berjumlah 25 (dua puluh lima) orang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK) PERENCANA

Sebagaimana sistem JFP, produktivitas dan prestasi kerja seorang PNS yang menduduki JFP dinilai berdasarkan angka kredit yang dicapai (Kepmenpan No. 16/M.PAN/3/2001). Dengan sistem angka kredit ini, seorang pejabat fungsional perencana diharapkan akan terdorong untuk lebih produktif dalam melakukan kegiatan perencanaan. Hal ini mengingat kenaikan pangkat dimungkinkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sedangkan kenaikan jabatan perencana akan menyesuaikan dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan.

Proses penilaian kegiatan perencanaan ke dalam angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit dengan dukungan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas membantu Tim Penilai Angka Kredit dalam pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi perencana.



▲ Peserta sedang mengikuti *workshop* PAK.

Dalam kaitan ini, fungsi Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di antaranya adalah melakukan pengadministrasian setiap usulan penetapan angka kredit, membuat jadwal sidang Tim Penilai Angka Kredit, melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data perencana, memantau perolehan angka kredit perencana, dan menyusun laporan kegiatan penilaian.

Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya akan berdampak pada profesionalitas pengadministrasian dan optimalisasi pelayanan kepada para pejabat fungsional perencana maka perlu ada upaya penyamaan visi dan dinamika pola pikir, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian bagi personel Sekretariat Tim Penilai, khususnya di bidang APAK, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan fungsinya.

Sehubungan dengan itu, Pusbindiklatren Bappenas mengadakan kegiatan *Workshop* APAK bagi Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, baik di tingkat instansi pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kegiatan sudah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2004 hingga saat ini.

Tujuan diselenggarakan *Workshop* APAK adalah (1) meningkatkan pengetahuan, keahlian dan

keterampilan bagi staf sekretariat Tim Penilai Angka Kredit baik di tingkat pusat, instansi, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan penilaian angka kredit bagi pejabat perencana; (2) menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir bagi anggota sekretariat Tim Penilai Angka Kredit baik di tingkat pusat, instansi, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas administrasi penilaian angka kredit bagi pejabat perencana; serta (3) meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan JFP bagi anggota sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dalam rangka pelaksanaan JFP.

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan *workshop* administrasi penilaian angka kredit, yaitu peserta mengetahui/memahami/mengerti/melaksanakan tentang (1) JFP; (2) konsep dasar kebijakan PNS; (3) organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana; (4) etika pelayanan penilaian angka kredit perencana; (5) pengisian formulir dan dokumen penilaian; (6) penatausahaan dan administrasi DUPAK; (7) korespondensi dan manajemen kearsipan; (8) sistem informasi penilaian angka kredit perencana; serta (9) penyusunan laporan penilaian kegiatan angka kredit perencana. Materi *Workshop* APAK terdiri atas (1) Kebijakan JFP; (2) Kebijakan ASN; (3) Etika Penilaian Angka Kredit; (4) Korespondensi dan manajemen Kearsipan; (5) Organisasi dan tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit; (6) Dokumen, Formulir Penilaian, dan Latihan; (7) Penatausahaan dan Administrasi Daftar Usulan penetapan Angka Kredit (DUPAK); serta (8) Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Perencana. Tiap-tiap materi diajarkan dalam waktu bervariasi antara 2–5 jam pelajaran dengan total 30 jam pelajaran.

Seperti halnya *Workshop* PAK, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran *Workshop* APAK adalah ceramah di kelas, pendalaman materi, diskusi, praktik penilaian, dan simulasi. Total peserta yang mengikuti *Workshop* APAK berjumlah 25 (dua puluh lima) orang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salam Perencana! **(Penulis: Rita Miranda/Pusbindiklatren Bappenas) ■**



Penataan Arsip Elektronik Pusbindiklatren

Pusbindiklatren memiliki ruang arsip yang hingga saat ini telah menampung kurang lebih 40.000 berkas arsip. Setiap hari, tiap-tiap bidang kerja di Pusbindiklatren Bappenas menciptakan arsip dengan dinamika yang bervariasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dapat dibayangkan dalam beberapa tahun ke depan, Pusbindiklatren memerlukan ruang penataan arsip yang cukup besar untuk menampung berkas-berkas arsip aktif maupun inaktif.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kinerja Bappenas, Pusbindiklatren melakukan inovasi sistem penataan berkas arsip aktif dan arsip inaktif dengan menjadikan arsip-arsip tersebut sebagai arsip elektronik yang dikelola secara *computerized* sehingga dapat mewujudkan efisiensi tempat dan efisiensi waktu pada saat pencarian arsip yang diperlukan. Arsip pun dapat disimpan dengan lebih aman dan terlindung dari kerusakan akibat fisik kertas yang rusak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Ketua Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas, pada Bab I Pasal 1 nomor 26 disebutkan bahwa alih media arsip adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeliharaan arsip melalui perubahan media simpan arsip dalam bentuk elektronik/media lainnya sesuai kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

PROSES PENCIPTAAN ARSIP ELEKTRONIK PUSBINDIKLATREN

Proses penciptaan arsip elektronik Pusbindiklatren dilakukan melalui transformasi digital dengan alih media/digitalisasi semua berkas arsip, dengan cara mengonversikan fisik arsip menjadi *file* digital (PDF/*e-paper*) menggunakan teknologi pemindaian (*scanning*).

Setiap harinya, Pusbindiklatren menghasilkan arsip-arsip persuratan, baik itu surat masuk yang ditujukan kepada Kepala Pusbindiklatren maupun

sebaliknya dari Kepala Pusbindiklatren kepada mitra-mitra kerja Pusbindiklatren. Surat, nota dinas, maupun memorandum tersebut biasanya dikonsepsikan oleh Kepala Bidang di lingkup Pusbindiklatren sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Pusbindiklatren.

Alur persuratan tersebut dikelola oleh petugas tata usaha. Setelah surat ataupun dokumen penting ditandatangani oleh Kepala Pusbindiklatren, petugas tata usaha akan memberikan nomor surat, setelah itu dilakukan pemindaian dan pemasukan berkas tersebut ke dalam *server* Pusbindiklatren. Selain itu, petugas tata usaha juga bertugas mendistribusikan surat masuk maupun ke luar kepada tiap-tiap bidang kerja di lingkup Pusbindiklatren, setelah Kepala Pusbindiklatren mendisposisikan kepada Kepala Bidang ataupun Kepala Sub-Bidang. Selanjutnya, petugas tata usaha tiap-tiap bidang akan melakukan pemasukan data untuk disimpan ke dalam aplikasi kearsipan Pusbindiklatren.

Arsip-arsip yang tercipta dari tiap-tiap bidang kerja ada pula yang berupa berkas-berkas Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU), Surat Keputusan, Berita Acara Penilaian Angka Kredit Perencana, laporan kegiatan, dan sebagainya yang biasanya berbentuk berkas tebal ataupun buku. Arsip-arsip tersebut dikategorikan sebagai arsip inaktif dan dikelola oleh bagian kearsipan Pusbindiklatren yang penataannya juga dikelola secara elektronik.

TAHAPAN ALIH MEDIA ARSIP PUSBINDIKLATREN

a. Pemilahan Arsip

Pemilahan arsip merupakan kegiatan memilah dan mengelompokkan arsip untuk membedakan antara arsip, non-arsip, dan duplikasi arsip.

b. Penyusunan Arsip (Pembuatan Skema)

Penyusunan arsip merupakan kegiatan menyusun berkas arsip secara kronologis berdasarkan pemilik kegiatan:

- pemberkasan berdasarkan kesamaan masalah (rubrik);

- pemberkasan berdasarkan kesamaan jenis (*serie*); dan
- pemberkasan berdasarkan kesamaan urusan (*dosier*).

c. Klasifikasi Arsip Secara Elektronik

Klasifikasi arsip secara elektronik merupakan kegiatan mengelompokkan arsip dan memberikan kode maupun indeks menggunakan aplikasi akses arsip digital berbasis *web* yang telah dimiliki Pusbindiklatren saat ini.

d. Deskripsi Arsip Secara Elektronik

Dokumentasi arsip secara elektronik merupakan kegiatan melengkapi deskripsi dari berkas arsip yang telah diberkaskan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi akses arsip digital berbasis *web* yang sudah dimiliki Pusbindiklatren saat ini. Beberapa deskripsi yang perlu dilengkapi, yaitu

- jenis arsip;
- tanggal arsip;
- kode klasifikasi;
- unit kerja; dan lain-lain.

e. Pemasukan Data (*Scanning*) Dokumen

Pemasukan data (*scanning*) dokumen merupakan kegiatan menuliskan ringkasan, kandungan arsip/dokumentasi, serta awal dan akhir terciptanya arsip.

f. Pelabelan Arsip Secara Elektronik

Pelabelan arsip secara elektronik merupakan kegiatan menyiapkan sejumlah *folder* sekaligus menulis kode arsip menggunakan aplikasi akses arsip digital/*web digital cabinet*.

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENATAAN ARSIP ELEKTRONIK PUSBINDIKLATREN

Kendala yang dialami dalam proses penataan arsip elektronik terkendala pada sarana pendukung:

- alat *scan* yang sering rusak karena tingkat penggunaan yang tinggi;
- masih kurangnya sarana pendukung digitalisasi (alat *scan*) karena pertumbuhan arsip Pusbindiklatren yang cukup banyak;

DIKLAT GELAR & NON-GELAR

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



Pusbindiklatren Bappenas memberikan kesempatan kepada para perencana atau ASN yang bekerja di unit perencanaan untuk mengikuti **Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kegiatan ini akan diadakan pada setiap tahun.

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan diklat tentatif antara bulan Maret–November 2017 setiap tahunnya. Kepastian waktu pelaksanaan dan institusi pelaksana akan diinformasikan melalui situs resmi Pusbindiklatren Bappenas. Diklat akan dilaksanakan selama 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja.

PEMBIAYAAN

Biaya diklat ditanggung Pusbindiklatren Bappenas. Biaya transportasi dari instansi asal ke lokasi diklat ditanggung instansi pengirim.

JENIS DIKLAT GELAR

- S2 Dalam Negeri
- S2 Luar Negeri
- S2 *Linkage*
- S3 Dalam Negeri
- S3 Luar Negeri



JENIS DIKLAT NON-GELAR

- **Diklat Substantif:**
Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD), Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan, Pengelolaan Bencana (*Disaster Management*), *Public Private Partnership* (PPP), *Local Economic Resource Development* (LERD), Perencanaan dan Penganggaran, *Monitoring* dan Evaluasi (Monev), Kelayakan Proyek (*Project Assessment*), dan topik-topik terkait lainnya.
- **Diklat Jabatan Fungsional Perencana** (Pertama, Muda, Madya, dan Utama)
- **Workshop Pendukung Jabatan Fungsional Perencana** (*Workshop* Penilaian Angka Kredit dan *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit)
- **Jenis Lainnya** (Magang Dalam Negeri, Magang Luar Negeri/*Staff Enhancement*, dan Konferensi Internasional)



Informasi selengkapnya dapat dilihat di situs Pusbindiklatren Bappenas:
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id



Nia Noorrahmah

Dinas Pekerjaan Umum Kota Cirebon, Jawa Barat

Alumni Beasiswa S2 *Linkage* Pusbindiklatren Bappenas (PHRD IV)

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

di Institut Teknologi Bandung dan Ritsumeikan University Jepang

Belajar Ilmu, Budaya, dan Perspektif Kehidupan

Saya mulai bekerja di Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2010 dan ditempatkan di bidang tata ruang. Kota Cirebon yang relatif kecil (seluas 39 km²), dengan kedudukannya sebagai pusat kegiatan bagi kota-kota di sekitarnya, memunculkan dinamika perkembangan tata ruang kota yang cukup kompleks. Pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan ruang kota yang terus berkembang mendorong saya untuk mencari kesempatan mempelajari lebih jauh mengenai perencanaan kota melalui jalur beasiswa pendidikan master (S2).

Pada tahun 2013, saya melamar program gelar Pusbindiklatren Bappenas untuk menempuh pendidikan master di bidang perencanaan. Tak dinyana, saya berhasil lolos sebagai karyasiswa pada program S2 *Linkage* Jepang. Pada tahun pertama, saya berkuliah di Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB). Adapun pada tahun kedua, saya melanjutkan studi di universitas di Jepang yang bekerja sama dengan ITB.

Saya pun tak ingin menyalahgunakan kesempatan emas ini. Terlebih, Pusbindiklatren sudah menyusun rangkaian program agar karyasiswa dapat melewati keseluruhan program gelar dengan baik.

Sebelum memulai perkuliahan, karyasiswa wajib mengikuti program *English for Academic Purpose* (EAP). Gemblengan para tutor di kelas EAP menjadi bekal penting untuk memasuki dunia akademik dan sangat membantu saat berinteraksi dengan beberapa rekan sekelas di ITB yang berasal dari Belanda dan Jerman.

Pertengahan tahun 2014, saya memulai perkuliahan tahun pertama di ITB. Materi kuliah yang diperoleh sangat berarti dalam membuka perspektif lain terhadap berbagai persoalan di dunia kerja. Terlebih mata kuliah Studio Perencanaan, di bawah bimbingan dosen senior, menjadi ajang mengasah keterampilan presentasi, berdiskusi, mengolah ide, mengeksplorasi banyak perspektif dalam menyikapi kompleksitas persoalan, serta melatih disiplin waktu.

Awal tahun 2015, saya mengikuti seleksi wawancara dan mempresentasikan proposal tesis di hadapan dua orang *sensei* (dosen) dari Ritsumeikan University Jepang yang berkunjung ke ITB. *Alhamdulillah*, tak lama kemudian saya mendapatkan kabar bahwa saya diterima di *Graduate School of Science and Engineering* di Ritsumeikan University. Bulan September 2015, saya dan rekan-rekan bertolak ke Jepang untuk memulai masa perkuliahan tahun kedua. Sebelumnya, Pusbindiklatren membekali kami dengan diklat intensif Bahasa Jepang selama dua bulan.

Masa satu tahun di Negeri Sakura ini betul-betul saya nikmati. Di kampus, saya sangat beruntung dibimbing Amano *Sensei* yang sangat suportif dan kritis saat berdiskusi. Secara rutin, *sensei* menyelenggarakan miniseminar untuk mendiskusikan perkembangan tesis saya dan rekan-rekan mahasiswa Jepang yang berada di bawah bimbingannya. Selain soal semangat kerja keras dan disiplin waktu, saya jadi banyak belajar dari rekan-rekan dari Jepang yang sangat efektif saat mempresentasikan ide-idenya.

Selain kehidupan kampus, saya juga berkesempatan untuk mencicipi dan meresapi ritme hidup dan interaksi dengan kultur Jepang. Saya juga sangat menikmati suasana empat musim yang tidak dijumpai di negara kita yang beriklim tropis. Hal lain yang tidak mungkin saya lewatkan begitu saja adalah kesempatan jalan-jalan saat libur. Pengalaman menjelajahi beberapa kota, terutama

kota Kyoto yang *compact*, sangat menginspirasi dalam menyelesaikan topik tesis saya.

Saya mengakhiri masa perkuliahan di Ritsumeikan University dengan nilai-nilai yang memuaskan. Saya pun berkesempatan mengikuti *Graduation Ceremony* pada bulan September 2015. Sepulang dari Jepang, saya kembali ke kampus ITB di Bandung. Selanjutnya pada bulan Oktober 2015, saya menjalani prosesi wisuda di ITB dengan predikat *cum laude*.

Banyak pelajaran penting yang saya peroleh dari kesempatan mengikuti program *S2 Linkage* Jepang dari Pusbindiklatren. Apa yang telah saya lalui mampu membuka cara pandang baru dalam menyikapi kompleksitas permasalahan di tempat asal. Yang selalu saya ingat adalah pesan *sensei* untuk jangan berhenti merespons masalah yang ada dengan memikirkan jalan keluar berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Sekecil apapun hal yang kita lakukan di tempat kerja, hal tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perubahan di masyarakat.

Buah dari program ini memberikan saya semangat baru untuk berkarya lebih baik. Hal lain yang saya rasakan betul manfaatnya adalah kesadaran untuk memelihara gaya hidup lebih sehat dengan berjalan kaki dan bersepeda sebagaimana saya temukan pada keseharian masyarakat Jepang. Terima kasih Pusbindiklatren Bappenas untuk kesempatan yang luar biasa! ■





Apri Dira Tome

Bappeda Kabupaten Kupang

Alumni Peserta Magang Dalam Negeri 2016
di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas

Pengalaman yang Bermanfaat

Setelah menerima Surat Kapusbindiklatren Bappenas No. 335/P.01/03/2016 tanggal 28 Maret 2016, saya pun berkesempatan mengikuti Magang Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas, mulai tanggal 11 April 2016 hingga 17 Juni 2016.

Peluang ini sangatlah berharga bagi saya. Banyak hal yang saya peroleh untuk mendukung tugas saya selaku staf perencana di Bappeda Kabupaten Kupang. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman untuk menimba ilmu kepada supervisor dan rekan-rekan di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas. Begitu pula dengan rekan-rekan di Pusbindiklatren yang selalu *welcome* setiap saya membutuhkan konsultasi terkait kegiatan ini.

Selama menjalani magang, saya membangun pemahaman konseptual dan empiris (berdasarkan pengalaman) dalam menganalisis fenomena kemiskinan serta memberikan strategi kebijakan yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi dalam menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan di daerah, khususnya di Kabupaten Kupang.

Selama mengikuti kegiatan tersebut, saya juga berkesempatan untuk mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan terkait penanggulangan kemiskinan di beberapa daerah yang saya kunjungi tersebut. Pengalaman-pengalaman yang nantinya dapat saya aplikasikan juga di Kabupaten Kupang. Adapun Kabupaten Kupang tempat saya tinggal dan bekerja saat ini masih termasuk kabupaten paling miskin di Indonesia.

Karena begitu bermanfaatnya kegiatan ini, sekedar saran dari saya, kegiatan ini harus terus berlanjut dan jangan berhenti sampai di sini. Momen tersebut sangat sulit diperoleh apalagi bagi putra-putra daerah seperti saya yang jauh akan informasi dan kesempatan penting seperti ini.

Terakhir, kesan saya akan kegiatan ini sungguh luar biasa dan bermanfaat. Banyak ilmu dan pengalaman menyenangkan yang saya peroleh. Semoga ke depannya saya pribadi masih bisa mendapatkan informasi dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Pusbindiklatren Bappenas. ■

Analisis Rantai Distribusi Semen di Koridor Selatan Jawa

Studi Kasus: **PT Holcim Indonesia Tbk., Plant Cilacap**

Oleh: **Saptadhi Sampurno**

Tesis Terbaik 2017
Diklat Gelar Pusbindiklatren

Setiap moda transportasi memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Dalam distribusi angkutan barang, pelaku industri akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan moda yang digunakannya. Melalui identifikasi kinerja distribusi semen dengan penggunaan moda truk dan moda kereta api, dapat diperoleh tingkat efektivitas dan efisiensi dalam merekomendasikan penggunaan moda. Metode dilakukan dengan cara mengukur kinerja distribusi semen melalui volume pengiriman per hari dengan memperhitungkan waktu distribusi, biaya distribusi, nilai waktu, biaya polusi, serta *generalized cost* pada area distribusi Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan, moda truk dengan kapasitas muatan yang besar lebih efisien dari segi biaya distribusi dan biaya polusi. Adapun moda kereta api lebih efisien dibanding moda truk dengan keunggulan kapasitas muatan yang lebih besar, tarif lebih murah, serta biaya polusi rendah.

PENDAHULUAN

Angkutan barang di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh angkutan jalan. Hingga saat ini, sekitar 80% pergerakan transportasi di Pulau Jawa masih didominasi oleh transportasi jalan (Kementerian Perhubungan, 2015). PT Holcim Indonesia Tbk. *plant* Cilacap, dengan produksi harian rata-rata 5.000 ton/hari, memberi kontribusi yang besar di wilayah selatan Jawa dalam distribusi angkutan barang. Distribusi semen dalam pelaksanaannya menggunakan moda darat, yaitu moda rel dengan kereta api dan moda jalan dengan kendaraan truk. Para pelaku usaha lebih memilih penggunaan truk daripada kereta api karena alasan *handling*, jadwal, aksesibilitas, dan sebagainya. Padahal, moda transportasi kereta api memiliki keunggulan, yaitu kapasitas daya angkut lebih besar dan waktu perjalanan yang relatif cepat, bebas pungutan liar, serta dan keamanan dan keselamatan barang lebih terjaga. Pengurangan beban jalan juga dapat dialihkan dan diseimbangkan dengan

moda transportasi kereta api. Faktor pemilihan penggunaan moda memegang peranan yang cukup penting terkait erat dengan kondisi, karakteristik, dan keandalan dari moda yang bersangkutan untuk mendapatkan distribusi barang yang efektif dan efisien. Para pelaku usaha akan memperoleh manfaat dan keuntungan dari strategi pemilihan penggunaan moda transportasi dengan tingkat efektivitas sebaran distribusi barang dan tingkat efisiensi biaya distribusi secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja, menganalisis efektivitas dan efisiensi, serta merekomendasikan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan moda transportasi truk dan kereta api pada distribusi semen.

WAKTU DISTRIBUSI ANGKUTAN BARANG

Kebutuhan waktu distribusi dipengaruhi oleh karakteristik dari penggunaan moda serta kinerja bongkar muat.

Kecepatan kendaraan (v)

$$v = \frac{\text{jarak}}{\text{waktu}} \text{ (km/jam)} \tag{1}$$

Headway (H)

$$H = \frac{60}{f} \tag{2}$$

H = waktu antara/headway (menit);

f = frekuensi kendaraan (jam)

Kinerja bongkar muat

Kinerja bongkar muat sangat dipengaruhi oleh jenis layanan bongkar muat dan peralatan bongkar muat. Waktu distribusi semakin cepat dengan penggunaan jenis alat bongkar muat dan peningkatan jumlah penggunaan alat bongkar muat.

BIAYA DISTRIBUSI ANGKUTAN BARANG

Untuk membandingkan secara kuantitatif harga jasa angkutan antarmoda truk dan kereta api maupun di antara jenis moda yang sama, dibutuhkan suatu ukuran. Ukuran yang digunakan adalah per ton.

BIAYA POLUSI

Biaya polusi dipengaruhi oleh konsumsi bahan bakar dan biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat konsumsi bahan bakar dari tiap-tiap moda. Konsumsi bahan bakar dihitung berdasarkan metode PCI (*Pacific Consultant International*) sebagaimana dikutip pada Lembaga Afiliasi dan Penelitian Industri (LAPI) ITB (1996) untuk jenis jalan perkotaan (*non-toll road*) dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y_{II} = 0,21692 S^2 - 24,1549 S + 954,78824 \tag{3}$$

$$Y_{II} = 0,21557 S^2 - 24,1769 S + 947,80882 \tag{4}$$

Y = konsumsi bahan bakar (liter/1000 km)

S = kecepatan kendaraan (km/jam)

Golongan II = truk besar dan bus besar dengan 2 gandar.

Golongan III = truk besar dengan 3 gandar atau lebih.

Biaya polusi dihitung dengan mengalikan *marginal health cost* per kendaraan (Rp/liter) dengan konsumsi bahan bakar (liter/km) dengan persamaan sebagai berikut.

$$BPU_t = KB_t \times BK_i \tag{5}$$

BPU_t = biaya polusi dalam waktu t (Rp)

KB_t = konsumsi bahan bakar dalam waktu t (lt)

BK_i = biaya kesehatan setiap liter bahan bakar i (Rp/lt)

NILAI WAKTU

Perhitungan nilai waktu menggunakan metode *revealed preference* dengan kenyataan waktu dan biaya perjalanan yang dibutuhkan dengan penggunaan moda transportasi truk atau kereta api pada satu siklus pengiriman dari titik asal (pabrik) ke tujuan (toko).

$$\text{Nilai waktu (Rp/jam)} = \frac{\text{Biaya Perjalanan (Rp)}}{\text{Waktu Perjalanan (jam)}} \tag{6}$$



▲ Kereta api menjadi salah satu moda yang digunakan untuk distribusi semen.

GENERALIZED COST

Ortuzar and Willumsen (2001) menjelaskan bahwa biaya keseluruhan perjalanan dihitung berdasarkan kombinasi antara biaya yang dikeluarkan dan biaya waktu perjalanan serta biaya atribut-atribut perjalanan lainnya. Persamaan *generalized cost* dinyatakan sebagai berikut.

$$C_{ij}^m = VOT (TT_{ij}^m) + TC_{ij}^m + CP_{ij}^m \quad (7)$$

C_{ij}^m = total biaya perjalanan

VOT = nilai waktu

TT_{ij}^m = total waktu perjalanan dengan moda m dari i ke j

TC_{ij}^m = total biaya operasi kendaraan dengan moda m dari i ke j

CP_{ij}^m = total biaya polusi dengan moda m dari i ke j

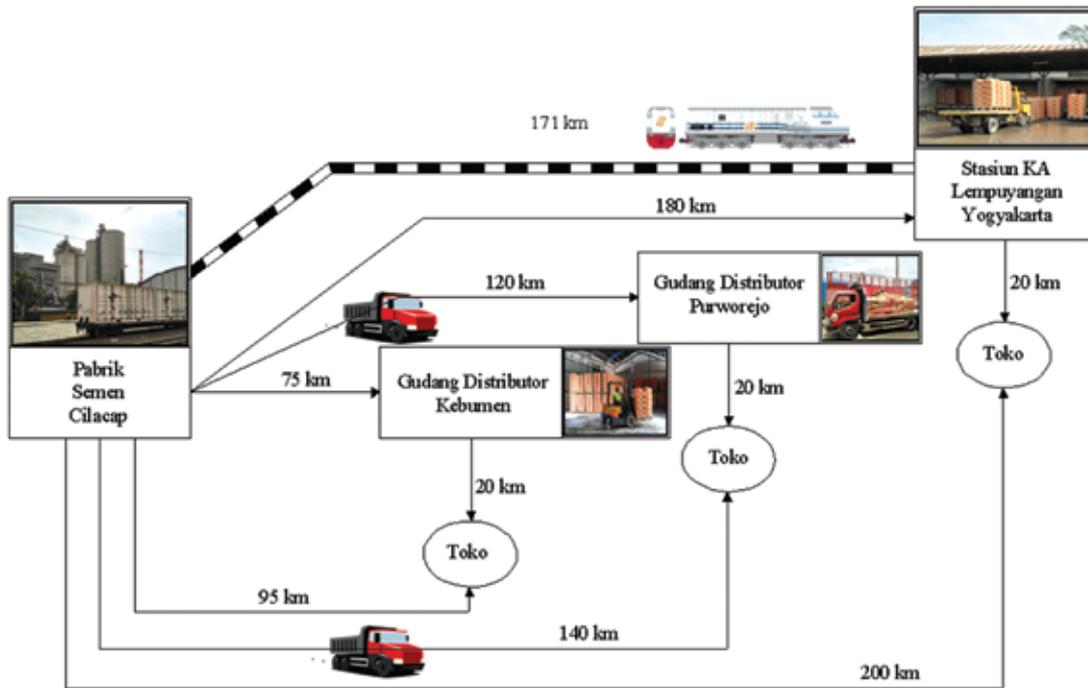
Biaya operasi kendaraan merupakan biaya yang ditanggung oleh operator (transporter). Adapun PT Holcim Indonesia Tbk. *plant* Cilacap dalam

kegiatan distribusi semen sebagai pengguna jasa transportasi. Dengan demikian, biaya perjalanan telah memperhitungkan komponen biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, retribusi, *overhead*, depresiasi, dan profit.

TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Berikut ini merupakan definisi efektif dan efisien menurut Sistem Transportasi Nasional (Kementerian Perhubungan, 2005).

- a. **Efektif** dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi rendah.
- b. **Efisien** dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi. Beban publik rendah dalam arti mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan pengorbanan tertentu yang harus ditanggung oleh pemerintah, operator, masyarakat dan lingkungan, atau memberikan manfaat tertentu dengan pengorbanan minimum.



GAMBAR 1. SKEMA DISTRIBUSI SEMEN

Berdasarkan tingkat efektivitas, aspek yang ditinjau pada distribusi semen meliputi prosedur pengoperasian kendaraan serta penggunaan sarana waktu tempuh perjalanan. Sementara untuk tingkat efisiensi, aspek yang ditinjau meliputi penurunan biaya distribusi, waktu distribusi, serta biaya polusi.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di PT Holcim Indonesia Tbk. *plant* Cilacap dan Stasiun Kereta Api (KA) Karangtalon Cilacap sebagai tempat asal. Adapun lokasi tujuan distribusi semen, yaitu Stasiun KA Lempuyangan Yogyakarta serta distributor semen Holcim di Purworejo dan Kebumen.

Pengumpulan data diklasifikasikan pada penggunaan moda dalam distribusi semen, yaitu moda truk dan kereta api. Data yang dibutuhkan meliputi survei waktu bongkar dan muat, waktu perjalanan, biaya perjalanan, kerusakan barang, jarak perjalanan, volume pengiriman, jenis dan jumlah kendaraan, serta konsumsi bahan bakar.

Pelayanan distribusi semen diukur dari volume pengiriman ke setiap lokasi tujuan. Di area Kebumen dan Purworejo, pelayanan distribusi menggunakan moda truk; berbeda dengan area Yogyakarta yang menggunakan moda kereta api dan truk. Jenis truk yang digunakan, yaitu tipe G1 (8 ton), G2 (16 ton), G3 (24 ton) dan G4 (32 ton). Pelayanan langsung (*door to door service*), pelayanan hantaran dari gudang distributor/stasiun menggunakan moda truk jenis G1 (8 ton). Volume pengiriman area Kebumen sebesar 128 ton/hari, Purworejo 216 ton/hari dan Yogyakarta 1.008 ton/hari. Skema distribusi semen ditunjukkan dalam Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Distribusi Semen

Kinerja distribusi semen dengan menggunakan moda kereta api dan truk diukur melalui beberapa variabel, yaitu waktu distribusi, biaya distribusi, nilai waktu, biaya polusi, dan *generalized cost*. Perhitungan kinerja distribusi semen dapat dilihat dalam Tabel 1.

TABEL 1. PERHITUNGAN KINERJA DISTRIBUSI SEMEN

Tujuan	Ship Out (ton)	Jenis Moda		Total Waktu (jam)	Total Biaya (Rp)	Nilai Waktu (Rp/jam)	Total Biaya Polusi (Rp)	Generalized Cost (Rp)
Kebumen	128	Truk	G1	7,12	10.720.000,00	1.506.323,19	672.913,99	11.392.913,99
			G2	6,42	15.812.266,24	2.464.249,28	407.290,05	16.219.556,29
			G3	6,38	14.916.266,24	2.336.751,89	337.454,33	15.253.720,57
			G4	6,53	14.916.266,24	2.283.101,98	272.191,59	15.188.457,83
Purworejo	216	Truk	G1	10,57	19.969.200,00	1.889.829,65	1.673.430,85	21.642.630,85
			G2	15,64	28.144.800,00	1.800.115,13	982.808,59	29.127.608,59
			G3	15,72	25.423.200,00	1.617.423,39	708.953,29	26.132.153,29
			G4	15,87	25.423.200,00	1.602.134,23	604.532,90	26.027.732,90
Yogyakarta	1.008	Truk	G1	27,82	113.148.000,00	4.067.633,31	11.156.205,65	124.304.205,65
			G2	18,85	160.607.996,64	8.520.318,12	6.135.913,11	166.743.909,75
			G3	15,84	154.862.396,64	9.775.637,87	4.404.862,72	159.267.259,36
			G4	14,55	154.862.396,64	10.643.463,69	3.621.709,83	158.484.106,47
		KA	17,08	152.055.222,28	8.900.793,50	2.049.280,56	154.104.502,85	

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi

Tingkat efektivitas dan efisiensi pada distribusi semen bertujuan agar proses distribusi tepat pada sasaran dan memberikan manfaat maksimal dengan beban yang rendah. Tingkat efektivitas dan efisiensi pada penelitian ini yang ditinjau meliputi prosedur pengoperasian kendaraan, penggunaan sarana, waktu tempuh perjalanan, biaya distribusi, biaya polusi dan penggunaan moda.

Prosedur pengoperasian kendaraan bertujuan agar selama proses distribusi semen terhindar dari kecelakaan akibat faktor pengemudi dan kendaraan pada penggunaan moda truk dan kereta api. Pada moda kereta api meliputi koordinasi kesiapan lokomotif dan gerbong yang ditangani oleh PT KAI Stasiun KA Karangtalun. Sementara itu, moda truk meliputi inspeksi kendaraan dan kondisi pengemudi. Melalui prosedur pengoperasian kendaraan yang telah ditetapkan, moda kereta api dan moda truk efektif dalam menjamin distribusi semen selamat sampai tujuan.

Penggunaan sarana moda truk dan kereta api diidentifikasi untuk mengetahui jumlah kendaraan yang digunakan untuk distribusi semen pada tiap-tiap area distribusi.

Moda Kereta Api

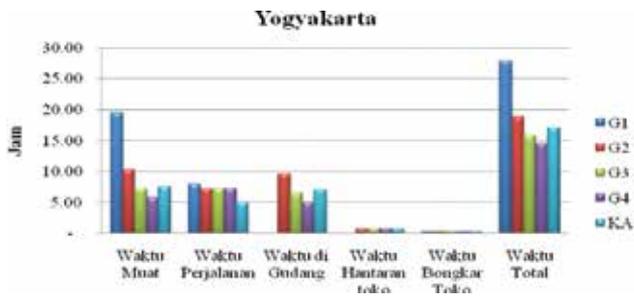
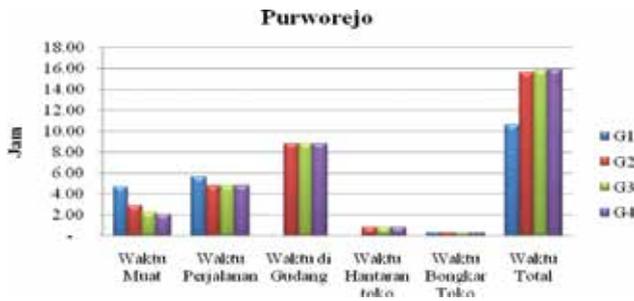
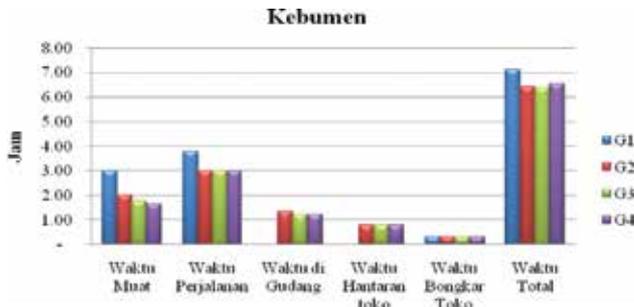
Sarana yang digunakan adalah lokomotif jenis CC206 untuk kereta barang. Pada distribusi semen, daya angkut maksimum hanya 20 gerbong/jadwal layanan. Untuk volume pengiriman 1008 ton dengan kapasitas layanan 720 ton/hari/jadwal dibutuhkan 2 jadwal layanan.

Moda Truk

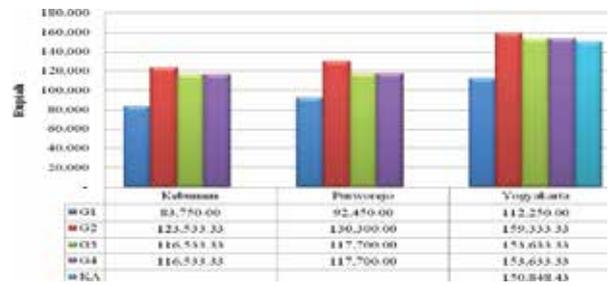
Kapasitas layanan truk di pabrik 2500 ton/hari dan kapasitas jumlah kendaraan 159 per hari. Kinerja pelayanan moda truk dapat dilayani apabila persentase jumlah kendaraan tidak melebihi persentase *ship out* (volume pengiriman). Truk G1 (8 ton) tidak terlayani dengan kebutuhan jumlah kendaraan yang lebih banyak. Karakteristik kendaraan G1 (8 ton) dengan layanan langsung ke toko (*door to door service*) hanya sebagai pendukung (*support*) setelah penggunaan jenis kendaraan G2 (16 ton), G3 (24 ton) dan G4 (32 ton).

Waktu tempuh pada distribusi semen meliputi waktu yang diperlukan dari tempat asal (pabrik) hingga sampai tujuan (toko). Kinerja waktu distribusi semen berdasarkan area distribusi ditunjukkan pada Gambar 2.

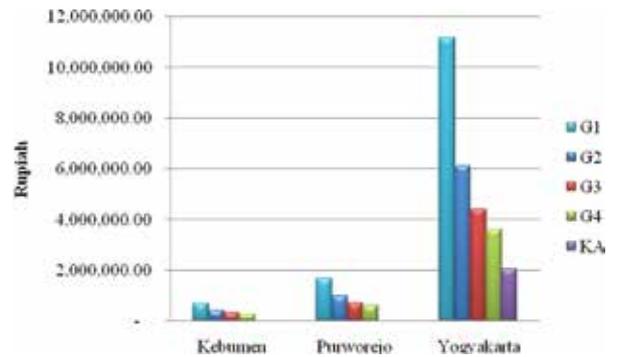
GAMBAR 2. PERBANDINGAN KINERJA WAKTU DISTRIBUSI SEMEN



GAMBAR 3. PERBANDINGAN BIAYA DISTRIBUSI SEMEN



GAMBAR 4. PERBANDINGAN BIAYA POLUSI MODA TRUK



Berdasarkan Gambar 2, prioritas penggunaan moda truk berdasarkan waktu distribusi dapat dipilih G2 (16 ton), G3 (24 ton) dan G4 (32 ton). Kendaraan G1 (8 ton) tidak dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan dan waktu total muat yang lama. Moda kereta api pada area distribusi Yogyakarta lebih lambat dibanding truk G4 (32 ton), G3 (24 ton) dikarenakan proses muat dan waktu bongkar muat di gudang yang lebih lama.

Perbandingan biaya distribusi (Rp/ton) penggunaan moda truk untuk area Kebumen dan Purworejo serta penggunaan moda truk dan moda kereta api untuk area Yogyakarta ditunjukkan dalam Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa semakin jauh jarak layanan distribusi maka biaya distribusi semakin meningkat.

Perbandingan biaya polusi penggunaan moda truk untuk area Kebumen dan Purworejo serta penggunaan moda truk dan moda kereta api untuk area Yogyakarta ditunjukkan dalam Gambar 4. Biaya polusi dipengaruhi oleh faktor jarak dan

banyaknya penggunaan kendaraan untuk distribusi semen ke gudang dan toko. Moda truk dengan jumlah muatan yang lebih banyak akan menggunakan lebih sedikit kendaraan pada proses distribusi. Prioritas penggunaan moda truk G4 (32 ton), G3 (24 ton), G2 (16 ton) dan G1 (8 ton) memberikan kontribusi beban publik (biaya polusi) yang lebih rendah. Moda kereta api merupakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dengan karakteristik biaya polusi yang rendah karena faktor muat barang yang tinggi, serta konsumsi bahan bakar yang lebih kecil dari moda truk.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan moda diperoleh dengan membandingkan variabel waktu dan biaya distribusi. Pada pelayanan langsung (*door to door service*) yang menggunakan truk G1 (8 ton), ditinjau dari segi biaya distribusi, lebih efisien dibanding dengan moda lainnya dikarenakan tidak adanya perantara dan barang langsung sampai tujuan. Namun, jika ditinjau dari penggunaan sarana, tidak terlayani dengan kebutuhan jumlah kendaraan dibanding kapasitas layanan kendaraan

TABEL 2. EFISIENSI DAN INEFISIENSI PENGGUNAAN MODA

Tujuan	Ship Out (ton)	Jenis Moda			Variabel					
					Waktu		Biaya Distribusi		Biaya Polusi	
					Δ (jam)	%	Δ (Rp)	%	Δ (Rp)	%
Kebumen	128	G3	vs	G4	0,15	2,30	0,00	0,00	-65.262,74	-23,98
		G3	vs	G2	0,03	0,52	896.000,00	5,67	69.835,72	17,15
		G4	vs	G3	-0,15	-2,35	0,00	0,00	65.262,74	19,34
		G4	vs	G2	-0,12	-1,82	896.000,00	5,67	135.098,46	33,17
Purworejo	216	G3	vs	G4	0,15	0,95	0,00	0,00	-104.420,39	-17,27
		G3	vs	G2	-0,08	-0,53	2.721.600,00	9,67	273.855,31	27,86
		G4	vs	G3	-0,15	-0,95	0,00	0,00	104.420,39	14,73
		G4	vs	G2	-0,23	-1,49	2.721.600,00	9,67	378.275,69	38,49
Yogyakarta	1.008	G4	vs	G3	1,29	8,15	0,00	0,00	783.152,89	17,78
		G4	vs	G2	4,30	22,81	5.745.600,00	3,58	2.514.203,28	40,98
		G3	vs	G4	-1,29	-8,88	0,00	0,00	-783.152,89	-21,62
		G3	vs	G2	3,01	15,96	5.745.600,00	3,58	1.731.050,39	28,21
		KA	vs	G4	-2,53	-17,41	2.807.174,36	1,81	1.572.429,26	43,42
		KA	vs	G3	-1,24	-7,84	2.807.174,36	1,81	2.355.582,16	53,48
		KA	vs	G2	1,77	9,37	8.552.774,36	5,33	4.086.632,54	66,60

Keterangan = (+) Efisien ; (-) Inefisien

dalam pabrik. Sementara itu, kebutuhan jumlah truk yang lebih banyak dan jarak layanan yang semakin jauh meningkatkan biaya polusi. Oleh karena itu, pelayanan jenis moda truk G1 (8 ton) dengan layanan langsung ke toko (*door to door service*) hanya sebagai pendukung (support) setelah penggunaan jenis moda truk G2 (16 ton), G3 (24 ton) dan G4 (32 ton) dan kereta api.

Berdasarkan uraian tingkat efektivitas dan efisiensi yang meliputi prosedur pelaksanaan kendaraan, prosedur pengoperasian kendaraan, penggunaan sarana, waktu tempuh perjalanan, biaya distribusi, dan biaya polusi, dapat diperoleh persentase efisiensi dan inefisiensi dari penggunaan jenis moda truk G2 (16 ton), G3 (24 ton) dan G4 (32 ton) dan kereta api pada distribusi semen sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

REKOMENDASI

Rekomendasi diberikan dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi. Rekomendasi penggunaan moda pada tiap-tiap area tujuan distribusi semen antara lain sebagai berikut.

Kebumen

Prioritas penggunaan moda truk jenis G4 (32 ton) lebih utama dibandingkan G3 (24 ton), dengan efisiensi biaya polusi sebesar Rp65.262,74 atau 19,34%.

Purworejo

Prioritas penggunaan moda truk jenis G4 (32 ton) lebih utama dibandingkan G3 (24 ton), dengan efisiensi biaya polusi sebesar Rp104.420,39 atau 14,73%.

Yogyakarta

Prioritas penggunaan moda kereta api memberikan efisiensi biaya sebesar Rp2.807.174,36 atau 1,81%; inefisiensi waktu sebesar 2,53 jam atau 17,41% serta efisiensi biaya polusi sebesar Rp1.572.429,26 atau 43,42% dibandingkan dengan kendaraan G4 (32 ton).

KESIMPULAN

Kinerja penggunaan moda transportasi pada distribusi semen dapat diukur melalui kinerja volume

pengiriman per hari dengan memperhitungkan waktu distribusi, biaya distribusi, tingkat kerusakan barang, nilai waktu, biaya polusi, serta *generalized cost*.

Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan moda pada distribusi semen, dapat diperoleh dengan meninjau prosedur pelaksanaan kendaraan, prosedur pengoperasian kendaraan, penggunaan sarana, waktu tempuh perjalanan, biaya distribusi, dan biaya polusi.

Prioritas penggunaan sarana moda truk dengan kapasitas muatan yang besar lebih efisien dari segi biaya distribusi dan biaya polusi. Penggunaan moda kereta api lebih efisien dibanding moda truk karena biaya distribusi dan biaya polusi yang rendah. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pekerjaan Umum, 2005, *Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan* (Pd. T-19-2005-B), Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, 2005, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)*, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, 2011, *Rencana Induk Perkeretaapian Nasional*, Ditjen Perkerataapian, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, 2015, *Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015–2019*, Jakarta.
- Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB, 1996, *Laporan Akhir Studi Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan PT. Jasa Marga*, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.
- Ortuzar, J.D. dan Willumsen, L.G., 2001, *Modelling Transport*, Third Edition, John Wiley & Sons.
- World Bank, (1993), *Marginal Health Cost (MHC) Indonesia: Energy and the Environment*.

++ Penulis merupakan Staf *Engineer* di Dinas Bina Marga SDA ESDM Kabupaten Cilacap dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas.



Ilustrasi: www.freepik.com

Mempelajari *Think Tank* Pemerintah Jepang

Sebuah Catatan dari Pelatihan “*The Government Think Tank*” di Jepang

Indonesia hanya memiliki sedikit “dapur pemikiran” (*think tank*). Menurut laporan “*Go to Think Tank 2015*” (University of Pennsylvania), jumlah *think tank* di Indonesia hanyalah 27, lebih kecil jika dibandingkan Jepang (109), Cina (435), Nigeria (48), Australia (63), apalagi Inggris (288) dan Amerika Serikat (1.835). Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan besaran ekonomi yang telah menempatkannya sebagai anggota G-20, jumlah *think tank* yang ada di Indonesia tersebut tentulah tidak memadai.

Think tank memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan di negara demokratis, khususnya karena usulan kebijakan (*policy proposal*) yang dikemukakan. *Think tank* dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat, institusi riset swasta, pusat penelitian di perguruan tinggi, dan dapat pula berafiliasi atau merupakan bagian dari pemerintah. Yang termasuk *think tank* pemerintah di antaranya Korea Development Institute, Thai Development Research Institute, dan Australia Productivity Commission.

Pada tanggal 17–28 Juli 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan pelatihan-kunjungan kerja mengenai *think tank* pemerintah di Jepang. Tulisan ini meringkaskan kegiatan serta kesan/pemikiran yang diperoleh dari pelatihan dan kunjungan kerja yang dilakukan di Universitas Ritsumeikan serta *think tank* pemerintah Jepang tersebut.

Setelah memahami kerja riset di Universitas Ritsumeikan, kebijakan pemerintah sebaiknya didasarkan pada riset/bukti (*research/evidence*). Riset dapat dilakukan oleh pihak lain, seperti pusat-pusat riset kebijakan di universitas. Rekomendasi kebijakan yang berasal dari riset perlu dikomunikasikan kepada pembuat/pelaksana kebijakan untuk diterapkan atau menjadi alternatif kebijakan.

Graduate School of Policy Science di Universitas Ritsumeikan Jepang merupakan salah satu sekolah pascasarjana yang mempelajari di antaranya tentang pembuatan suatu kebijakan sebagaimana mestinya. Sebagian besar waktu pelatihan diadakan di kampus yang terletak di Kota Ibaraki, Osaka, tersebut.

Sejumlah profesor, yang dikoordinasikan oleh Profesor Kamikubo, mempresentasikan riset yang telah dilakukan. Para peserta pelatihan dapat mempelajari kemampuan para profesor tersebut dalam mendefinisikan permasalahan, memilih metode untuk mengembangkan alternatif solusi, memilih alternatif kebijakan yang tepat, dan merekomendasikannya. Kasus-kasus yang disajikan berkaitan dengan pembuatan kebijakan dalam pengembangan daerah pegunungan (*sato-yama*), daerah nelayan (*sato-umi*), mitigasi bencana, perencanaan wilayah dan kota, manajemen publik, manajemen bisnis dan teknologi, hingga permasalahan korupsi birokrasi. Permasalahan besar demografi Jepang (masyarakat manula) mewarnai dalam pengungkapan permasalahan yang dihadapi.

Selain kuliah dan *workshop* di kelas, dalam kesempatan pelatihan tersebut juga diselenggarakan simposium internasional mengenai

“Kebutuhan dan Prospek Dapur Pemikiran Kebijakan”. Dalam simposium tersebut, kami mempresentasikan makalah berjudul “*Significance and Prospects of Policy Think Tanks in Indonesia*.” Peserta pelatihan juga diajak berkunjung ke Biro Turisme Osaka dan menyaksikan Tenjin Matsuri, salah satu festival tradisional terbesar Jepang yang diselenggarakan di Osaka.

RIETI-METI

Research Institute of Economy, Trade, and Industry (RIETI) yang berada di kawasan perkantoran Pemerintah Pusat Jepang di Kasumigaseki, Tokyo, merupakan “*think tank* pemerintah” pertama yang dikunjungi peserta pelatihan. RIETI merupakan institut riset untuk mendukung terutama *Ministry of Economy, Trade, and Industry* (METI), kementerian yang termasuk terkuat/terbesar dalam kabinet pemerintahan Jepang.

RIETI baru didirikan pada tahun 2001, untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi Jepang, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri yang semakin berat seiring bertambah ketatnya persaingan dagang dan industri internasional, sedangkan masyarakat Jepang semakin didominasi kaum manula (*aging*) yang produktivitasnya menurun. Di sisi lain, bencana alam yang sering terjadi di negara kepulauan itu dapat mengganggu daya saing mereka. Disadari pula bahwa keterbatasan birokrat (pejabat struktural) di METI untuk menghasilkan pikiran segar serta kebijakan inovatif berasal dari sifat pekerjaan mereka yang rutin, tetapi melelahkan. Oleh karena itu, kehadiran sebuah institusi riset kebijakan sangat dibutuhkan.

RIETI bertugas melakukan kajian kebijakan serta memberikan usulan kebijakan terutama terkait ekonomi, perdagangan, dan industri kepada Pemerintah Jepang. Tema besar kajian RIETI ditentukan berdasarkan Rencana Jangka Menengah (*Medium Term Plan*), sedangkan pemilihan topik kajian ditentukan melalui *brain-storming* dengan *stakeholders* yang cukup luas. Dalam melakukan kegiatannya, RIETI mengandalkan pengkaji



▲ Industri di Jepang
Foto: www.fm.cnbc.com

kebijakan dari sumber internal, tetapi juga bekerja sama dengan *fellow* dari berbagai tempat, terutama universitas. RIETI juga memiliki jaringan kerja internasional yang cukup luas terutama dengan negara-negara Asia Timur.

RIETI telah memberikan rekomendasi kebijakan yang cukup banyak kepada Pemerintah Jepang. Institut riset kebijakan ini bekerja cukup produktif, sebagaimana tampak dalam daftar publikasi mereka yang berupa makalah kebijakan, laporan diskusi kebijakan, simposium dan seminar kebijakan, buku teks, maupun jurnal akademik.

PRI - MOF

Policy Research Institute (PRI) Kementerian Keuangan/*Ministry of Finance* (MOF) Jepang melakukan tugas-tugas yang mirip dengan RIETI-METI. Secara resmi didirikan tahun 2000, institut

riset kebijakan ini sebenarnya berusia lebih tua, karena merupakan pengembangan dari *Institute of Fiscal and Monetary Policy* yang didirikan tahun 1985.

Seperti halnya RIETI yang secara teratur menerbitkan catatan/buku mengenai “Kebijakan Perdagangan dan Industri Jepang”, PRI juga menerbitkan “Sejarah Kebijakan Fiskal dan Moneter Jepang” yang melingkupi kurun waktu lebih panjang. PRI juga melakukan survei dan pencatatan statistik yang lebih luas mengenai keuangan negara Jepang, melakukan kerja sama internasional di bidang riset kebijakan keuangan, serta melakukan *training* kepada staf Kementerian Keuangan Jepang di berbagai tingkatan mengenai kebijakan keuangan negara.

Kementerian Keuangan Jepang termasuk kementerian tertua di Jepang dengan berbagai pengalaman lama dan luas serta catatan-catatan panjang yang tersimpan rapi di kantor mereka di kawasan Kasumigaseki, Tokyo. Termasuk dalam *database* tersebut adalah utang-utang Pemerintah Indonesia ke Jepang yang digunakan untuk pembangunan berbagai sektor pembangunan di Indonesia.

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Think tank memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan di negara demokratis. Jepang termasuk negara dengan peranan *think tank* telah berkembang. Ritsumeikan termasuk salah satu universitas di Jepang yang aktif melakukan pekerjaan riset dan menyampaikan hasilnya sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah.

RIETI-METI dan PRI-MOF Jepang adalah contoh *think tank* pemerintah, yang melakukan riset dan menyumbangkan usulan kebijakan khususnya kepada Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri serta Kementerian Keuangan Jepang. RIETI dan PRI merupakan bentuk *think tank* yang baik, yang peranan, tugas, dan cara bekerjanya dapat ditiru oleh Pemerintah Indonesia. **(Penulis: Hanan Nugroho/Perencana Utama Bappenas) ■**



Foto: www.p3km-unhas.com

Diklat Fungsional Perencana

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku instansi pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perencana. Unit yang menyelenggarakan Diklat Fungsional Perencana adalah Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan, Perencanaan (Pusbindiklatren).

Sasaran dari Diklat Fungsional Perencana adalah perencana yang akan menduduki jabatan lebih tinggi, atau calon pemangku JFP yang akan diangkat pertama kali atau pindah jabatan dari jabatan lain. Untuk lebih mendalami tentang JFP, kita dapat mempelajari Peraturan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(Men-PAN) Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Pertimbangan regulasi tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan; perlu adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan secara penuh sebagai perencana; dan untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan/jabatan dan profesi di bidang perencanaan pembangunan.

Untuk mengetahui secara lebih terinci dan lengkap terhadap ketentuan tersebut dapat langsung dilihat pada Kepmen-PAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2001.



Foto: www.p3km-unhas.com

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu dipahami sebagai berikut.

1. **Perencana** adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
2. **Perencanaan** adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan pada masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
3. **Rencana** adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijakan, rencana program, dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor, maupun daerah.
4. **Kegiatan perencanaan** adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode, ataupun

teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijakan, rencana program, rencana proyek, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

5. **Angka kredit** adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
6. **Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana** adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
7. **Pejabat Pembina Kepegawaian** adalah menteri, jaksa agung, sekretaris negara, sekretaris kabinet, sekretaris militer, sekretaris presiden, sekretaris wakil presiden, kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara.
8. **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi** adalah Gubernur.
9. **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota** adalah Bupati/Walikota.

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang perencana meliputi (1) **Perencana Pertama**, terdiri atas Penata Muda (golongan ruang III/a) dan Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b); (2) **Perencana Muda**, terdiri atas Penata (golongan ruang III/c) dan Penata Tingkat I (golongan ruang III/d); (3) **Perencana Madya**, terdiri atas Pembina (golongan ruang IV/a), Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b), Pembina Utama Muda (golongan ruang IV/c); dan (d) **Perencana Utama**, terdiri atas Pembina Utama Madya (golongan ruang IV/d) dan Pembina Utama (golongan ruang IV/e).

PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

1. KEPMENPAN No. 16/Kep/M.PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya

2. SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP.1106/ Ka/08/2001 dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.019/M. PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana
4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.020/M. PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana
5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.234/M. PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana
6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M. PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;
7. KEPMENPPN/Ka. Bappenas No.: KEP.266/M. PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana
8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.011/M. PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana;
9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEP.012/M. PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana
10. KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
11. KEP. Kepala BKN No. 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
12. SE DJA Depkeu No. SE-188/A/2003 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
13. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.013/M. PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjurusan Perencana
14. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA No.PER/60/M. PAN/6/2005 tentang Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
15. SE DJP Depkeu No. SE-67/PB/2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;
16. PERATURAN KEPALA BKN No.28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
17. SURAT EDARAN DJA No.SE-74/PB/2006, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
18. PERPRES RI No. 38 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Perencana
19. Permen PPN/Kepala Bappenas No.PER 006/M. PPN/09/2006 tentang perubahan atas Kepmen PPN/Ka Bappenas No. KEP.013/M.PPN/02/2003 tentang Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Penjurusan Perencana
20. Perpres No. 44/2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
21. PERATURAN PRESIDEN RI No. 17 Tahun 2009, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki JFP

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Diklat Fungsional Perencana, Anda dapat menghubungi Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP, Pusbindiklatren Bappenas, di nomor telepon (021) 31928279/80/85 ekstensi 113. Anda juga dapat menghubungi lewat ponsel ke Sdr. Fuad Setiawan di nomor 082338208000 dan Sdr. Ivan Budi Susetyo di nomor 08563135522. **(Penulis: Ivan Budi Susetyo/Pusbindiklatren) ■**



ASOSIASI PERENCANA



PEMERINTAH INDONESIA

SELAMAT DATANG

PESERTA FORUM DISKUSI NASIONAL (FDN) PERENCANA SE-INDONESIA 2016

Mengkaji Isu-isu Strategis Kebijakan Publik, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
ASRAMA HAJI PONDOK GEDE, JAKARTA TIMUK - KEMENTERIAN AGAMA RI, 5-6 DESEMBER 2016

MEWUJUDKAN NAWACITA MELALUI PEMBANGUNAN YANG SINERGI DAN APARATUR YANG PROFESIONAL



Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional

dalam Perspektif Peraturan
Pemerintah RI Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

Oleh: **Dr. Haryanto, S.E., M.A.**

Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi
Perencana Profesional Indonesia (AP2I)
Periode 2015-2018

Wikipedia (2009) menyebutkan *"Professions usually have professional bodies organized by their members, which are intended to enhance the status of their members and have carefully controlled entrance requirements"*.

Salah satu karakter utama dari sebuah pekerjaan profesional adalah adanya sebuah organisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan. Dalam organisasi profesi itulah, para anggota profesi berkiprah dalam kebersamaan dan kesejawatan, bersatu padu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesi yang digelutinya. Organisasi profesi pada umumnya berpedoman pada *catur dharma* organisasi profesi, yaitu (1) berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi profesi; (2) meningkatkan mutu pelayanan kepada sasaran

layanan; (3) menjaga kode etik profesi, dan (4) pemberian advokasi kepada para anggotanya.

Berdasarkan keempat *dharma* tersebut, organisasi profesi dituntut untuk dapat memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggotanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan berbagai inovasi untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan dari profesi yang bersangkutan, baik berdasarkan pemikiran kritis maupun kajian/penelitian. Untuk itu, kerja sama mutualistik antara organisasi profesi dengan berbagai lembaga kajian dan pengembangan (*think tank*) yang dapat mengembangkan ilmu dan inovasi baru terkait profesi tersebut mutlak diperlukan. Selain itu, organisasi profesi juga perlu membina dan memotivasi para anggota dan praktisi profesi di

lapangan agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi (standar kompetensi) yang disyaratkan sehingga ada jaminan kualitas bagi para pengguna jasa layanan (kementerian/ lembaga/provinsi/kabupaten/kota) maupun masyarakat luas.

Organisasi profesi juga harus merumuskan, menetapkan, dan menegakkan kode etik profesi agar dalam pelayanan profesi tidak tercemari oleh berbagai bentuk penyimpangan (malpraktik). Kode etik organisasi profesi inilah yang akan menjaga wibawa dan martabat profesi. Organisasi profesi juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum (advokasi) untuk kelancaran kegiatan profesi dan keamanan para anggota dalam bekerja, dalam pengabdiaannya kepada masyarakat. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya memperkuat eksistensi dan merupakan bentuk pengakuan secara yuridis formal (meskipun sebelumnya sudah diamanatkan dalam penjelasan Pasal 3, PP 16 tahun 1994) terhadap keberadaan organisasi asosiasi profesi para pemangku jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tentunya perlu disambut gembira dengan harapan tiap-tiap profesi dapat menjalankan perannya secara elegan dan bermartabat serta mampu meningkatkan kinerja dan pengabdiaannya demi menjalankan peran dan fungsi tiap-tiap pemegang profesi dalam jabatan fungsional ASN.

ORGANISASI/ASOSIASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DALAM PP 11 TAHUN 2017

Saat ini, keberadaan dan peran organisasi profesi dalam jabatan fungsional ASN relatif kurang bergaung. Untuk itu, pemerintah perlu secara serius, konsisten, dan berkelanjutan membina organisasi profesi dalam jabatan fungsional ini, agar kiprah yang diemban organisasi, sebagaimana termaktub dalam pemikiran *catur dharma* organisasi profesi, dapat dilaksanakan secara baik. Keseriusan dan konsistensi pembinaan organisasi profesi bisa diwujudkan melalui pengawasan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada kinerja instansi pembina dalam membina organisasi profesi. Alternatif lain, Kementerian PAN-RB dapat membentuk Komite Pengendalian Kinerja Instansi Pembina dan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional ASN.

Para pengurus organisasi profesi jabatan fungsional ASN tentunya menyambut baik atas lahirnya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai pengakuan secara yuridis atas organisasi profesi dalam jabatan fungsional. Anggapan dari beberapa pihak bahwa organisasi profesi jabatan fungsional hanyalah kumpulan dari orang-orang termarginalkan dan kurang berperan di organisasi, harus dihilangkan. Asosiasi profesi harus menjadi mitra instansi pembina dalam implementasi *catur dharma* organisasi profesi: mitra dalam menegakkan kode etik profesi; mitra dalam menyusun standar kompetensi profesi; mitra dalam pemberian advokasi dan pengembangan profesi; serta mitra dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi bagi profesi terkait.

Amanat Pasal 101 PP 11/2017 antara lain (1) Setiap jabatan fungsional yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi jabatan fungsional dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan jabatan fungsional; (2) setiap pejabat fungsional WAJIB menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional; (3) pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional difasilitasi instansi pembina; (4) organisasi profesi jabatan fungsional wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, ditetapkan oleh organisasi profesi setelah disetujui oleh Instansi Pembina; (5) Organisasi profesi jabatan fungsional mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi; (6) Instansi pembina menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional dan hubungan kerja instansi pembina

dengan organisasi profesi jabatan fungsional. Bahkan dalam pasal 131 PP 11/2017 disebutkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong melalui mutasi dari JPT satu ke JPT lainnya dapat dilakukan melalui uji kompetensi atau harus memenuhi standar kompetensi teknis yang dibuktikan melalui sertifikasi teknis dari organisasi profesi.

ANALISIS

Dari penjelasan di atas, hal paling mendesak yang perlu dilakukan oleh Pembina Jabatan Fungsional adalah menyiapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional. Untuk itu, sebaiknya Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Instansi Pembina Jabatan Fungsional tentang batas akhir penyusunan Permen tersebut, dan diusulkan agar selambat-lambatnya 6 bulan setelah keluarnya PP 11/2017.

Reformasi pengelolaan jabatan fungsional menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah, mengingat hingga saat ini, jumlah jabatan fungsional sudah mencapai 120 jenis (MenPAN-RB, 2017). Jumlah ASN pemangku jabatan fungsional mencapai 4.022.026 orang (2.306.046 orang fungsional tertentu dan 1.716.021 orang fungsional umum) (BKN, 2017). Potensi yang luar biasa ini akan menjadi aset bagi pemerintah dalam mendorong roda reformasi birokrasi dengan adanya mitra, asosiasi jabatan fungsional ASN yang dapat membangun sebuah sinergi dan jaringan kerja sama dalam rangka memberikan input dan pelayanan yang berkualitas kepada pemerintah dan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan *catur dharma* organisasi profesi.

Bila menengok kembali ke Pasal 101 PP 11/2017 ada beberapa pemikiran yang dapat dijadikan bahan renungan bersama, yaitu

1. Kewajiban setiap pejabat fungsional menjadi anggota organisasi profesi dalam

jabatan fungsionalnya merupakan langkah yang sangat baik dari pemerintah untuk mendorong berkembangnya organisasi profesi tersebut. Untuk itu, dalam Permen tentang hubungan kerja antara organisasi profesi dan instansi pembina perlu ditegaskan *reward and punishment* bagi anggota terkait keanggotaannya dalam organisasi profesi;

2. Bagi pengurus, yang sebagian besar adalah para ASN, tentu akan menjadi beban kerja tambahan untuk menggerakkan roda organisasi. Untuk itu, perlu ada intervensi dari pihak Kementerian PAN-RB kepada para Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dalam bentuk surat edaran, akan kewajiban instansi pembina agar dapat memberikan dukungan pembiayaan dan dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas jabatan fungsional terkait.
3. Selaras dengan Pasal 131 PP 11/2017 yang menyiratkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong melalui mutasi dari JPT satu ke JPT lainnya dapat dilakukan melalui uji kompetensi atau harus memenuhi standar kompetensi teknis yang dibuktikan melalui sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Tugas organisasi profesi jabatan fungsional perlu diperluas, tidak hanya penyusunan kode etik, advokasi, dan pemberian rekomendasi, tetapi juga terkait tugas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta penyelenggaraan uji kompetensi profesi.
4. Sehubungan dengan butir 3 di atas maka setiap organisasi profesi perlu membentuk lembaga sertifikasi profesi yang harus memenuhi persyaratan yang cukup berat dari BNSP, antara lain berbadan hukum (ada notaris), mempunyai minimal 20 orang yang bersertifikat asesor, dan telah mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Perlu dipahami bersama bahwa proses penyusunan SKKNI membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan banyak *stakeholders* terkait. Ini semua memerlukan dukungan dari instansi pembina.

5. Dengan memperhatikan komunitas pemangku jabatan fungsional ASN yang begitu besar (jumlah pejabat mencapai 4.022.026 orang dari total ASN), dan perlu ditingkatkan produktivitasnya, maka sudah waktunya pemerintah (KemenPAN-RB) menjadi pendorong utama atas berbagai perubahan dalam rangka reformasi jabatan fungsional ASN. Salah satunya adalah membentuk Komite Pengawas dan Pengendali Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Organisasi Profesi agar penggunaan dana APBN oleh para pemangku jabatan fungsional memberikan dampak yang sepadan melalui kinerja yang mereka hasilkan bagi pelayanan dan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemberlakuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS merupakan dukungan nyata pemerintah kepada Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional untuk bangkit memerankan kiprahnya dalam mengemban tugas *catur dharma* organisasi profesi, yaitu (1) pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi profesi; (2) peningkatan mutu pelayanan kepada sasaran layanan (perumusan standar kompetensi); (3) penegakan kode etik profesi; dan (4) pemberian advokasi kepada para anggotanya. Peran organisasi profesi jabatan fungsional ASN juga sangat strategis karena diberikan ruang untuk berkembang dan menyusun standar kompetensi profesi yang nantinya dapat digunakan sebagai uji kompetensi keahlian dalam pengisian JPT yang lowong akibat proses mutasi.

Untuk itu, agar organisasi profesi jabatan fungsional ASN mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong program reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *catur dharma* organisasi profesi maka beberapa hal berikut direkomendasikan:

1. Perlu penerbitan Surat Edaran dari Kementerian PAN-RB tentang batas akhir penyusunan Permen tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan

Fungsional, dan diusulkan agar selambat-lambatnya 6 bulan setelah keluarnya PP 11/2017;

2. Di dalam Surat Edaran, perlu pula ditegaskan bahwa dalam jangka pendek sampai dengan menengah, misalnya 1 tahun sampai dengan 3 tahun, instansi pembina wajib mengalokasikan dalam RKA Kementerian/Lembaga (K/L) berupa dukungan kegiatan untuk organisasi profesi jabatan fungsional terkait, hingga fungsi utama *catur dharma* organisasi profesi berjalan secara baik, termasuk pembentukan LSP dan perumusan SKKNI;
3. Perlu dibentuk Komite Pengawas dan Pengendali Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Kinerja Organisasi Profesi dalam upaya efektivitas penggunaan anggaran APBN agar para pejabat Fungsional benar-benar secara optimal memerankan fungsinya secara baik sesuai bidang keahliannya;
4. Penyiapan Permen tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional dan Hubungan Kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional oleh instansi pembina wajib melibatkan organisasi profesi jabatan fungsional terkait (khususnya bagi jabatan fungsional yang organisasi profesinya sudah terbentuk). ■

REFERENSI

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
 - PP 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
 - Kepmenpan No.16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
 - <https://www.menpan.go.id/sdm- Aparatur/1256-daftar-jabatan-fungsional-khusus-tertentu>
 - http://www.anri.go.id/assets/download/4_MATERI_DEPUTI_BKN.pdf
-



Inovasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Muara Enim

Oleh: Aldy K. Mardikanto, Hony Irawan, dan Yayat Hidayat

Sanitasi atau pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu jenis layanan dasar yang masih belum diprioritaskan dalam agenda pembangunan. Akses sanitasi layak Indonesia saat ini adalah 67,2% (BPS, 2016), masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina (75%), Thailand (95%), dan Malaysia (100%) (UNICEF/WHO, 2017).

Kondisi sanitasi di daerah perkotaan lebih buruk lagi karena angka cakupan sistem pengelolaan air limbah terpusat masih merupakan yang terendah di Asia (2%) dan mayoritas (lebih dari 80%) penduduk perkotaan memiliki akses sanitasi yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air limbah yang digunakan mayoritas penduduk perkotaan, dan juga secara nasional, merupakan sistem setempat, yaitu dengan menggunakan

tangki septik atau *cubluk*. Dominasi penggunaan sistem pengelolaan air limbah setempat ini diprediksi akan berlangsung 20 hingga 30 tahun ke depan mengingat besarnya investasi yang harus dikeluarkan untuk pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sistem terpusat, serta masih rendahnya demand pemerintah daerah dan masyarakat terhadap sistem terpusat. Ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4/2017 bahwa daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 300 juta jiwa/hektare seharusnya sudah menggunakan sistem sanitasi terpusat, salah satunya untuk meningkatkan kesehatan.

Dominasi ini membawa risiko pencemaran lingkungan yang tinggi karena walaupun disebut tangki septik, sekitar 84%-nya bocor, atau tidak kedap. Hal ini terlihat dari hampir 70% 'tangki septik'



▲ Kegiatan sosialisasi dampak tangki septik bocor terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

tersebut tidak pernah disodot lumpur tinjanya dan hanya kurang dari 5% yang pernah disodot dalam interval 5 tahun (WSP, 2013). Di daerah perkotaan, hal tersebut meningkatkan risiko sanitasi karena kepadatan penduduk yang tinggi tidak memberikan ruang yang cukup untuk luasan sistem setempat (tangki septik beserta bidang resapan untuk efluennya) agar kualitas pengolahan sistem setempat dapat memenuhi standar. Mengingat lebih dari 60% penduduk Indonesia di perkotaan masih menggunakan sumur sebagai sumber airnya (BPS, 2014) maka kualitas efluen sistem setempat yang buruk akan mencemari kualitas air tanah yang menjadi sumber air dalam sumur.

Pemerintah pusat dengan target Akses Universal sanitasi tahun 2019 dalam RPJMN 2015–2019 berupaya meningkatkan kesadaran dan demand pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sanitasinya melalui berbagai macam cara. Terlebih lagi, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satunya dengan

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam TPB, indikator mengenai sanitasi, selain akses layak, adalah akses aman yang ditempuh dengan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan pengelolaan lumpur tinja untuk sistem setempat. Pengelolaan lumpur tinja ini mencakup perbaikan tangki septik, perbaikan sistem pengelolaan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik, dan peningkatan kualitas pengelolaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT). Skema pengelolaan lumpur tinja ini diprioritaskan di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Sesuai dengan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menduduki kursi kendali dalam perencanaan strategis di lingkup daerahnya, termasuk untuk pembangunan sanitasi yang merupakan salah satu bagian dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, konsep rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang saat ini sedang dibahas akan menjadikan pengelolaan air limbah domestik sebagai salah satu dari enam urusan yang ditetapkan SPM-nya. Hal ini meningkatkan urgensi peningkatan kapasitas dan kreativitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasinya.

Gambaran Umum

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 600.398 jiwa (BPS, 2015), dan sebanyak 19,7% penduduknya tinggal di daerah perkotaan (BPS, 2010). Hanya 1 dari 20 kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk kurang dari 300 jiwa/hektare sehingga sebenarnya sistem sanitasi setempat yang digunakan sudah tidak tepat lagi dan seharusnya sudah diganti menjadi sistem terpusat .

Akses sanitasi layaknya sebesar 70,46% (2016), meningkat dari 66,72% (2015) dan berada di atas akses Provinsi Sumatera Selatan (64,51%). Berdasarkan distribusi target akses sanitasi tahun 2019 di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada distribusi target akses sanitasi nasional untuk seluruh provinsi, target akses sanitasi layak Kabupaten Muara Enim adalah sebesar 88%. Dengan tren peningkatan akses sanitasi sebesar 3,5% per tahun selama lima tahun terakhir, kesenjangan akses saat ini terhadap target 2019 sebesar 17,54% menimbulkan urgensi percepatan pencapaian target di kabupaten ini. Berdasarkan urgensi tersebut serta komitmen dalam hal pengelolaan air limbah domestik yang aman, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengeluarkan inovasi “Amnesti Tangki Septik Bocor” sejak tahun 2017.

AMNESTI TANGKI SEPTIK BOCOR (ATSB)

Deskripsi Program

Program Amnesti Tangki Septik Bocor (ATSB) dilaksanakan dengan memberikan amnesti pada masyarakat yang belum mempunyai jamban sehat dengan tangki septik aman. Mengambil konsep

dan ketenangan dari program *tax amnesty* yang diluncurkan pemerintah tahun lalu, program ATSB ini diluncurkan dalam acara “*Launching* Inovasi Program Amnesti Tangki Septik Bocor Kabupaten Muara Enim” oleh Bupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim, H. Nurul Aman, S.H. dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Muara Enim tahun 2017. Bentuk amnesti dalam program ini dilakukan dengan pemberian hibah dari dana APBN/APBD untuk pembangunan tangki septik aman (sebagian termasuk jamban sehat) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem komunal dengan sambungan rumah antara 50–100 Sambungan Rumah (SR). Untuk non-MBR disediakan pula skema bantuan melalui dukungan pembiayaan seperti skema mikro kredit. Program ini juga mencakup pemberian subsidi 100% untuk biaya penyedotan tinja bagi MBR. Selain itu, saat ini sedang dibahas program “traktir sedot tinja” untuk ditawarkan melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan tujuan dapat menyubsidi layanan sedot tinja untuk masyarakat non-MBR .

Subsidi (atau pengampunan) dalam program ATSB direncanakan berlangsung hingga tahun 2019. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sedang melakukan finalisasi bentuk *rewards and punishment* yang akan diberikan bila masyarakat yang belum mempunyai tangki septik aman tidak mendaftar pada program ATSB ini.

Program dilakukan dengan memetakan target rumah tangga yang belum memiliki tangki septik aman. Hal ini dilakukan dengan survei teknis tangki septik melalui sinergi berbagai pihak dan program, misalnya aplikasi pendataan berbasis android bagi seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan serta mahasiswa Akademi Kebidanan Muara Enim dalam rangka program pengabdian masyarakat dan kader Posyandu di beberapa kecamatan. Personel pendataan di tiap-tiap OPD dan kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Program juga mencakup kegiatan



(kiri dan tengah)

Beberapa materi sosialisasi Amnesti Tangki Septik Bocor dalam bentuk brosur dan standing banner.

(kanan)

Tampilan aplikasi pendataan tangki septik berbasis android



coaching permulaan untuk operator IPLT teknis penyedotan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT.

Dari aspek regulasi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh dan Berkelanjutan, yang mencakup pelaksanaan inovasi program ATSB mulai dari tujuan, target, hingga mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan. Tahun ini juga sedang disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Surat Keputusan (SK) Bupati tentang operator pendata tangki septik seluruh pegawai OPD dan kecamatan. Untuk mendukung koordinasi, Surat Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi (Pokja AMS) juga telah ditetapkan.

Kebutuhan Program

Anggaran yang diperlukan untuk penerapan amnesti bagi MBR sekitar Rp 14,8 milyar selama tiga tahun (2017–2019). Adapun total anggaran untuk pembiayaan keseluruhan program bisa mencapai

lima kali lipat dari biaya tersebut. Besarnya biaya yang diperlukan menuntut adanya sinergi pendanaan dari pemerintah (APBN, APBD, dan APBDes) dan partisipasi dana dan bantuan pembiayaan non-pemerintah (CSR-PKBL dari Dunia Usaha, dana ZISWAF), serta swadaya masyarakat.

Program ini juga memerlukan peranan berbagai pihak, seperti media yang gencar mempromosikan program ATSB ini, baik media cetak maupun elektronik.

Target Program

Target Program ATSB antara lain adalah tercapainya target akses sanitasi layak sebesar 88,0% pada tahun 2019, meningkatnya penyedotan lumpur tinja dari 3 m³/hari menjadi lebih dari 10 m³/hari, meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tangki septik aman, tersedianya data kepemilikan jamban sehat dan tangki septik aman, adanya kelembagaan yang mandiri untuk pengelolaan air limbah domestik, dan meningkatnya operasionalisasi IPLT.

Tantangan yang dihadapi

1. Keperluan dana yang besar dan kerja sama yang sinergis antara OPD dan *stakeholder* lainnya untuk mengimplementasikan program ATSB.
2. Promosi yang perlu lebih gencar dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang ATSB.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pokja AMS dan pihak terkait.
4. Kapasitas regulator bidang sanitasi dan operator IPLT yang perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan program ATSB ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memperlihatkan kepemimpinan dan kreativitasnya dalam penyediaan layanan sanitasi sekaligus pencapaian target bidang sanitasi pada tahun 2019. Program ASTB menjawab tantangan peningkatan *demand*, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap layanan sanitasi, sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran yang ditimbulkan dari sistem sanitasi setempat yang kurang berkualitas. Pemkab juga menunjukkan inisiatif yang baik dengan menerbitkan dasar hukum untuk gerakan sanitasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk menjamin kejelasan arah dan strategi pembangunan bidang sanitasi bagi seluruh *stakeholders*. Selain itu, Pemkab pun menunjukkan inisiatif yang baik dalam konsolidasi pendanaan, yaitu pemetaan sumber daya potensial yang diarahkan sesuai dengan pemetaan target dan lokasi, tidak hanya dari program pemerintah, tetapi juga dari kontribusi swasta serta skema pembiayaan dan sinergi program lainnya.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan aplikasi berbasis android dalam survei teknis tangki septik untuk pemetaan target program juga menunjukkan inisiatif efisiensi sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Diperlukan komitmen dan stamina yang kuat dalam rangka pemantauan program jangka menengah ini. Akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengoordinasikan program inovatif ini perlu dijaga

melalui pelaksanaan dan pemantauan di lapangan secara reguler dan keterbukaan hasil kepada publik. Konsep program yang unik ini perlu terus dipromosikan untuk mendapatkan perhatian seluruh pihak dengan harapan dapat menggali sumber daya yang diperlukan. Skema apresiasi kreatif terhadap seluruh *stakeholder* yang berperan juga penting untuk menjamin keberlangsungan dukungan mereka terhadap program ini. ■

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

APRESIASI/ACKNOWLEDGEMENT

Apresiasi diberikan kepada:

1. Segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, secara khusus kepada Ketua Pokja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Muara Enim.
2. Tim *Urban Sanitasi Development Program* (USDP) yang mendampingi Pemerintah Pusat, dan khususnya dalam kasus ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam upaya peningkatan kondisi sanitasi di Indonesia.

Profil Penulis

- Aldy K. Mardikanto adalah Fungsional Perencana Muda, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Hony Irawan dan Yayat Hidayat berasal dari *Urban Sanitation Development Program* (USDP)



Optimasi Pengelolaan Fungsi *Think Tank* di Bappenas

Oleh: Eko Wiji Purwanto

Institusi pemerintah dengan peran perencanaan dan fungsi *think tank* sudah ada sejak awal kemerdekaan. Prof. Bintoro Tjokroamidjojo dalam kata pengantar buku *Perencanaan Pembangunan (1979)* mengatakan, "Usaha-usaha merencana dan menjalankan pembangunan nasional sudah kita mulai sejak permulaan negara kita ini merdeka, yaitu sejak zaman Panitia Pemikir Siasat Ekonomi dahulu pada tahun 1947."

PENDAHULUAN

Pentingnya peran perencanaan dalam pembangunan sangat dipahami oleh *founding fathers*. Pada awal kemerdekaan, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tanggal 12 April 1947, pemerintah membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diberikan mandat untuk membantu pemerintah

memecahkan persoalan pembangunan negara. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi adalah kumpulan para ahli dengan beragam latar belakang.

Tugas dan kewajiban para ahli dalam Panitia Pemikir Siasat Ekonomi adalah menyiapkan bukti dan buah pikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menghadapi perundingan dengan Belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan negara. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi juga menjalankan peran perencana pembangunan sekaligus *think tank* di dalamnya. Saat ini, setelah 72 tahun kemerdekaan, perencanaan pembangunan masih menjadi kebutuhan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, seperti yang tertulis dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

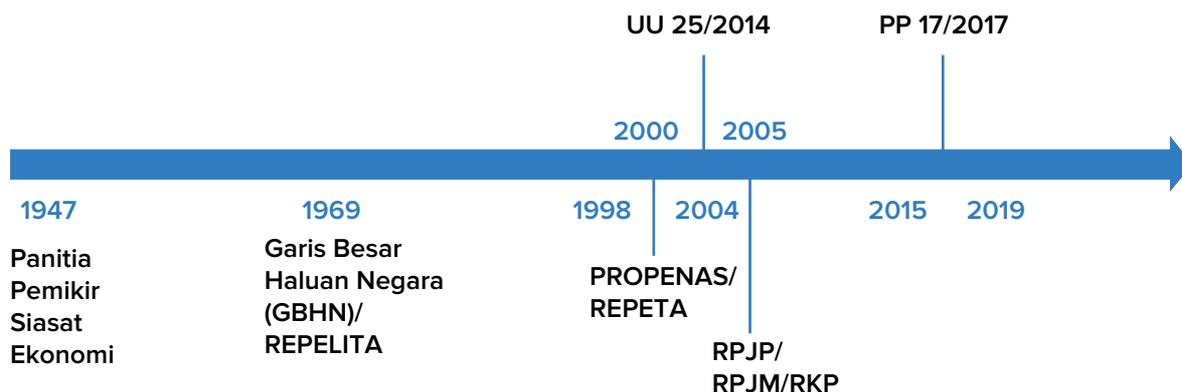
PEMBAHASAN

Selama ini, penyusunan rencana pembangunan nasional telah dilaksanakan oleh Bappenas. Jika dihitung dari penetapan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi maka saat ini telah 70 tahun peran perencanaan pembangunan hadir. *Timeline* sejarah perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.

Sepanjang 1947–2017, berbagai hal telah terjadi dalam perencanaan pembangunan. Pada periode 1947–1967, dinamika ekonomi politik yang penuh dengan turbulensi (perang kemerdekaan, pemberontakan di daerah, hingga Gerakan 30 September) memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pada periode 1969–1996, peran kelembagaan perencanaan pembangunan cukup signifikan dalam mendorong pencapaian pembangunan. Ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut yang mencapai 6% per tahun. Namun, datangnya krisis ekonomi yang menjadi krisis multidimensi pada tahun 1997/1998 meluluhlantakkan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi minus 13% dan peran perencanaan pembangunan mulai dipertanyakan.

Pasca-pemerintahan Presiden Soeharto, dokumen perencanaan berevolusi. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapuskan. Setelah itu, Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) diperkenalkan. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilahirkan untuk mengisi kekosongan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang sebelumnya berdasarkan GBHN dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sejak 2004, diperkenalkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahun.

Setiap tahapan dalam siklus perencanaan (perencanaan–implementasi–*monitoring*–evaluasi) akan saling berkaitan. Hasil evaluasi akan digunakan dalam proses perencanaan berikutnya dan tahapan pun akan kembali lagi seperti urutan di atas. Kualitas dokumen perencanaan menentukan kualitas tahapan berikutnya. Kualitas dokumen perencanaan yang buruk mengakibatkan tahapan implementasi



GAMBAR 1. *TIMELINE* SEJARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

menjadi tidak optimal. Sementara itu, hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi kunci untuk perbaikan proses perencanaan berikutnya.

Kualitas dokumen perencanaan dipengaruhi oleh proses penyusunan rencana tersebut. Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional menyusun dokumen perencanaan berdasarkan studi lapangan–hasil kajian serta *monitoring*–evaluasi dari implementasi proses perencanaan. Tantangan penyiapan dokumen perencanaan adalah membawa kualitas hasil riset sebagai dasar kebijakan (*bridging research to policy*) serta menyusun dan mengelola kebijakan yang berdasarkan pengetahuan (*knowledge based policy*).

Siklus perencanaan menuntut kontinuitas kualitas dalam setiap tahapan perencanaan, hal yang bersinggungan dengan fungsi Bappenas sebagai pembuat kebijakan dan *think tank*, seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Bappenas. Kebijakan yang diambil membutuhkan dasar-dasar pengambilan kebijakan. Kualitas riset dan pengelolaan pengetahuan di Bappenas dapat menjadi acuan awal dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Peran *think tank* di Bappenas perlu diperkuat untuk menghadapi dinamika nasional dan global.

Saat ini peran *think tank* di Bappenas dilakukan terdesentralisasi pada setiap unit kerja eselon 1 dan eselon 2. Setiap unit kerja perencanaan di tingkat eselon 2 mengelola anggaran untuk kegiatan kajian, koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi. Sementara pada tingkat eselon 1, terdapat kegiatan prakarsa strategis mengenai kajian komprehensif tentang tema pembangunan tertentu. Peran *think tank* di Bappenas wajib diperkuat untuk menghadapi tantangan dinamika nasional dan global yang dipicu oleh demokratisasi melalui media sosial serta adanya perubahan lanskap ekonomi politik nasional dan global.

Media sosial mendorong keterbukaan beragam isu di hampir seluruh lapisan masyarakat, hal yang pada masa lalu hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Media sosial juga berpengaruh terhadap lanskap ekonomi dan politik di masyarakat. Desentralisasi yang terus bergulir semakin signifikan memengaruhi relasi pusat dan daerah serta berimplikasi terhadap pencapaian hasil pembangunan di setiap daerah. Implikasi dinamika nasional dan global adalah dibutuhkan perencanaan yang berkualitas (berdasarkan riset dan pengetahuan) yang tanggap terhadap kebutuhan perubahan, bukan sekadar jargon holistik, integratif, tematik, dan spasial.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan di kementerian/lembaga dan Bappenas. Dalam hal substansi perencanaan, sinkronisasi perencanaan regional dan sektoral adalah suatu prasyarat mutlak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang paling optimal. Penguatan peran *think tank* di Bappenas diarahkan untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Peran dan fungsi *think tank* di Bappenas perlu ditegaskan kembali melalui mekanisme internal yang transparan dan akuntabel.

Saat ini kajian dan kegiatan yang terkait dengan fungsi *think tank* di Bappenas perlu dikoordinasikan secara terintegrasi dan menyeluruh oleh unit kerja yang mendapatkan mandat. Mandat ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) PPN/Kepala Bappenas Nomor 6/2017 tentang Perubahan atas Permen PPN Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai turunan dari Perpres Nomor 20 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Bappenas. Kemanfaatan peran dan fungsi *think tank* perlu dioptimalkan melalui revitalisasi peran dan fungsi ini dengan penyiapan unit kerja Pusat Analisis Kebijakan (PAK) sebagai mitra *quality assurance*.

Revitalisasi peran *think tank* di Bappenas dapat dimulai dari penegasan peran *think tank* pada unit kerja di tingkat eselon 2 serta penegasan peran PAK sebagai mitra *quality assurance* kegiatan yang terkait fungsi *think tank*. PAK dapat membantu peran biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dalam menjaga kualitas kajian yang selama ini telah dilakukan terdesentralisasi. Perlu menjadi perhatian bahwa unit kerja eselon 2 di kedeputan teknis serta PAK memiliki proses bisnis dan *output* yang berbeda. Penegasan peran perlu didiskusikan secara komprehensif dan berhati-hati agar menghasilkan kesepakatan yang bulat mengenai indikator kinerja setiap unit dan tidak menimbulkan duplikasi.

Sinergi dan kolaborasi antarunit kerja dimulai dari sinkronisasi tema-tema kajian yang diselaraskan dengan prioritas nasional pembangunan dan kebutuhan strategis yang harus dipenuhi. PAK menjadi gerbang kendali kualitas produk *think tank* dengan melibatkan para fungsional perencana yang berkompeten dari setiap unit kerja eselon 2 serta dapat mengundang ahli yang berkompeten dari perguruan tinggi atau sektor swasta jika dibutuhkan. Pada akhirnya optimasi pengelolaan fungsi *think tank* bermuara pada peningkatan kualitas perencanaan pada sisi *input*, proses, keluaran, serta kemanfaatannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Selama ini peran *think tank* di Bappenas telah dilakukan terdesentralisasi pada setiap unit kerja eselon 1 dan 2. Hadirnya PAK seyogyanya dapat memperkuat peran dan fungsi *think tank* yang sudah ada, sekaligus meningkatkan kualitas produk terkait peran dan fungsi *think tank* di Bappenas. PAK menjadi *leading unit* dalam menjalankan fungsi *think tank* di Bappenas. Penegasan PAK sebagai *leading unit* fungsi *think tank* Bappenas diselaraskan dengan mandat PAK. Jika dipandang perlu *leading unit* dapat melibatkan *fellow* dari eksternal Bappenas, misalnya dari perguruan tinggi atau sektor swasta. Penguatan fungsi *think tank* ditujukan untuk peningkatan kualitas seluruh siklus perencanaan pembangunan

Pembagian peran para pemangku kepentingan internal Bappenas dalam menjalankan fungsi *think tank* di Bappenas perlu ditegaskan kembali dalam mekanisme internal. Mekanisme yang transparan dan akuntabel akan menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga kualitas produk *think tank* yang dihasilkan.

Yang sedang dilakukan Bappenas dalam menjalankan fungsi *think tank* dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meninjau perlu tidaknya *local government think tank* secara khusus diselenggarakan. Peran *local government think tank* dapat saja diperankan oleh perguruan tinggi lokal, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan *prefecture* (setingkat provinsi) di Jepang. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Perpres 20/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Permen PPN/Kepala Bappenas No. 6/2017 tentang Perubahan atas PermenPPN No. 4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenPPN/ Bappenas
- Paguyuban Alumni Bappenas, 2011, BAPPENAS dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945–2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Jakarta

Profil Penulis

Eko Wiji Purwanto merupakan Perencana Madya di Kementerian PPN/Bappenas. Tulisan ini dicuplik dari presentasi penulis yang disampaikan pada *International Symposium between Indonesia and Japan on Significance and Prospect of Policy Think Tank* di Ritsumeikan University (Osaka Campus), Jepang, pada tanggal 20 Juli 2017



Foto: www.bappeda.muaraenimkab.go.id

Inovasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim

Oleh: Dr. Ir.H. Abdul Nadjib S., M.M.

Pembangunan bukanlah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan bukan semata berasal dari pemerintah saja (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota), tetapi dapat pula berasal dari kontribusi dunia usaha dan masyarakat.

Bila dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah selama ini, titik berat pembiayaan hanya berasal dari pemerintah, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota, karena memang peraturan perundangan memberikan arahan demikian. Ke

depan, pembiayaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dapat mengakomodasi pembiayaan yang berasal dari dunia usaha termasuk perbankan dan masyarakat. Kondisi demikian sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut: (1) untuk mengoptimalkan sinergi keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah; (2) untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah; (3) untuk menata pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam suatu perencanaan pembangunan yang terintegrasi; dan (4) untuk dapat menginventarisasi aset hasil pembangunan secara akuntabel.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berisi rencana pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan

program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun anggaran. Penyusunan RKPD dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Pembiayaan dalam RKPD tersebut dititikberatkan pada APBN dan APBD. Keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat belum diatur secara baik dalam peraturan perundangan tersebut.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, telah mulai mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Keikutsertaan mereka sudah dimulai dari tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbang Desa), Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik di tingkat kabupaten, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat juga

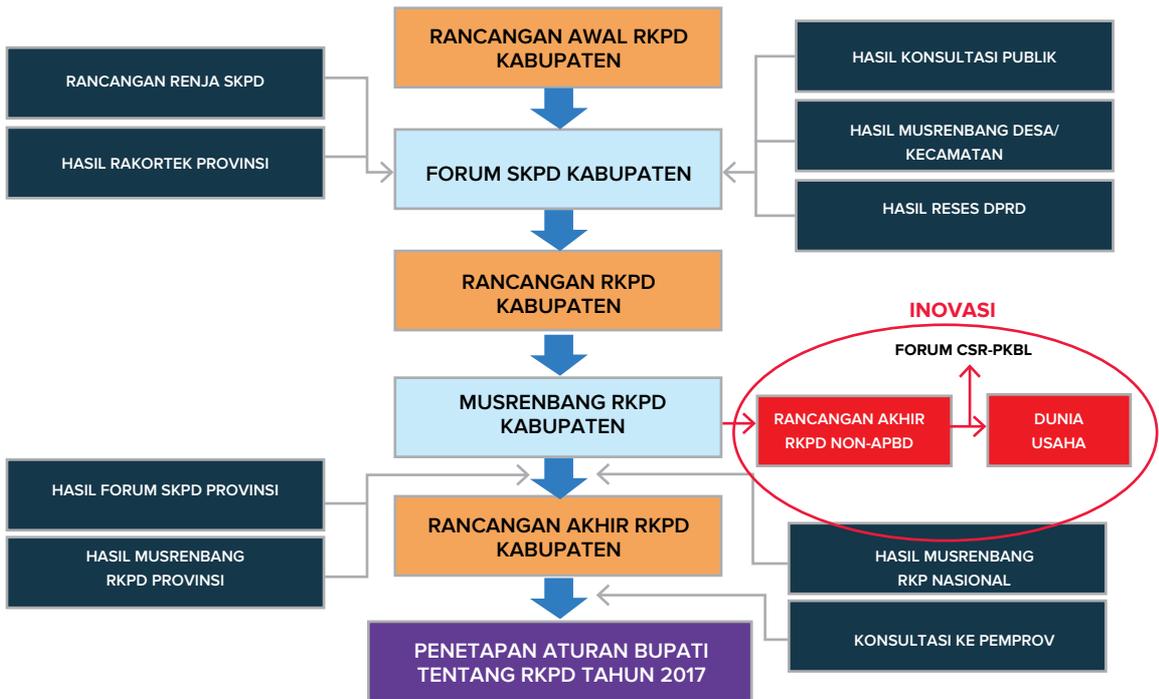
mengetahui dan memahami usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam Forum OPD di tingkat kabupaten, usulan-usulan masyarakat yang telah diverifikasi bersama (oleh Bappeda, OPD, Pemerintah Kecamatan/Desa, dan *stakeholder* lainnya) berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan Bupati dan prinsip *money follows program* akan disepakati untuk di akomodasi dalam Rancangan RKPD. Dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pendapatan daerah, beberapa usulan program pembangunan yang tidak dapat dibiayai dari APBD akan dimasukkan dalam rencana program pembangunan yang akan diusulkan kepada dunia usaha dan atau masyarakat untuk dibiayai pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil dari Forum OPD adalah Rancangan RKPD yang akan dibiayai APBD dan Rancangan RKPD Non-APBD yang akan diusulkan pembiayaannya dari dunia usaha dan masyarakat.

Di bawah ini disajikan bagan tahapan perencanaan pembangunan sehingga diperoleh RKPD APBD dan RKPD Non-APBD.



GAMBAR 1. INOVASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2017



GAMBAR 2. INOVASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKP 2017



GAMBAR 3. INOVASI KEBIJAKAN PENDANAAN RKP 2017



Output Kebijakan Inovasi Penyusunan RKPD 2017

Melalui inovasi kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut, pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim dapat lebih besar karena telah mengikutsertakan peran dunia usaha dan masyarakat. Sebagai contoh, untuk Kabupaten Muara Enim dalam tahun anggaran 2017, pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten) berjumlah 2,586 triliun rupiah, sedangkan yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat berjumlah 1,069 triliun rupiah. Dengan demikian, total pembiayaan program pembangunan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2017 berjumlah 3,654 triliun rupiah atau 141 % dari anggaran pembiayaan yang disediakan pemerintah.

Berdasarkan uraian singkat di atas, inovasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk RKPD Non-APBD yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam dua tahun terakhir ini dapat memberikan dampak positif sebagai berikut: (1) meningkatnya pelaksanaan pembangunan daerah; (2) terintegrasinya pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; serta (3) meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. ■

Profil Penulis

Dr. Ir. Abdul Nadjib S., M.M. adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim



Implementasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan

pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ende

Oleh: Adrianus Yosafat Muda

Pagu Indikatif Kewilayahan (PIW) telah berjalan sejak tahun 2012 di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PIW merupakan terobosan untuk memastikan prioritas program sesuai dengan yang direncanakan dan dijamin ketersediaan pendanaan secara lebih rasional. Penjabaran PIW di Kabupaten Ende dikenal dengan nama Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (Pides/Pikel).

LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Ende memulai dengan menerapkan pendekatan wilayah kecamatan melalui

Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) pada pelaksanaan Musrenbang (integrasi) pada tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya, kami menukik pada skala desa dan kelurahan melalui Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (Pides/Pikel) sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini. Sejalan dengan waktu, upaya, dan kerja keras, program tersebut menunjukkan hasil yang positif. Setiap tahun, usulan masyarakat dipastikan terakomodasi seluruhnya di dalam RKPD, yang diikuti dengan peningkatan persentase dalam alokasi APBD. Kunci dari keberhasilan ini adalah kejelasan pagu/kuota anggaran dan jaminan keterwakilan masyarakat dalam keseluruhan proses.

KERANGKA KONSEP DAN REGULASI

Pagu indikatif diartikan sebagai patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk suatu program atau kegiatan prioritas. Pagu indikatif pada dasarnya terdiri atas Pagu Indikatif Sektorial atau Organisasi Perangkat Daerah (PI OPD) dan Pagu Indikatif Kewilayahaan (PIW). PI OPD merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diarahkan dalam rangka perencanaan *top down* OPD. Adapun PIW merupakan patokan batas maksimal anggaran untuk perencanaan program di tingkat wilayah (kecamatan, desa/kelurahan).

Penerapan Pides/Pikel (sebagai PIW) di Kabupaten Ende sesungguhnya terlambat. Regulasi perencanaan telah mengamanatkan hal ini sejak tahun 2008, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, yang secara operasional mendetailkan definisi dan proses perhitungan pagu indikatif.

Mekanisme penyusunan program/kegiatan untuk PIW ini dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan. Perumusan program dan kegiatan untuk pagu indikatif wilayah tetap mengacu pada prioritas pembangunan kabupaten/kota. PIW bukanlah alokasi dana yang diberikan kepada kecamatan dan desa/kelurahan, tetapi merupakan alokasi besaran dana pembangunan di suatu wilayah. PIW juga menjadi pegangan bagi setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut berdasarkan usulan masyarakat.

PIDES/PIKEL DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014–2019, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah yang disebut “*Tiwu Telu*” atau Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende. *Tiwu*

Telu dijabarkan dalam 2 (dua) program pokok, yaitu program pembangunan daerah (strategis/unggulan) dan program terkait penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya (operasional). Program strategis/unggulan dikenal dengan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), yaitu program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati. Sementara itu, program operasional diarahkan untuk pemenuhan layanan OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Pides/Pikel merupakan *platform* kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014–2019 sebagai upaya menerjemahkan visi “Terwujudnya Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Dengan istilah lain, Pides/Pikel merupakan kebijakan (perencanaan) yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran *Tiwu Telu*, dengan masyarakat sebagai ordinar atau penentu. Pada tataran perencanaan anggaran, Pides/Pikel merupakan proporsi indikatif pendanaan sebesar 700 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah yang diberikan kepada desa dan kelurahan untuk berpartisipasi dalam perumusan *Tiwu Telu* melalui pendekatan *bottom-up* dan partisipatif.

PIDES/PIKEL PADA PROSES PERENCANAAN

Implementasi Pides/Pikel setiap tahun dalam proses perencanaan diawali penyampaian besaran Pides/Pikel oleh Bupati Ende untuk tiap-tiap desa dan kelurahan pada forum Rapat Koordinasi Pamong Praja pada bulan Desember tahun N-2, atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan pada bulan Januari tahun N-1. Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Desa, penyampaian besaran Pides/Pikel dilaksanakan lebih awal (bulan Juli–Agustus tahun N-2), menyesuaikan ketentuan pelaksanaan Musyawarah Desa berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Besaran Pides/Pikel setiap tahun mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014–2019, yaitu sebesar 200 milyar rupiah (*referensi: Tabel 3.17*

RPJMD Kabupaten Ende). Dari besaran angka tersebut dirumuskan alokasi untuk 278 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Ende. Alokasi didasarkan pada asas adil dan merata, dengan rumusan alokasi dasar (70%) dan alokasi berdasarkan kriteria (30%). Alokasi berdasarkan kriteria dilakukan dengan memerhatikan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan jumlah dusun.

Guna menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD, alokasi Pides/Pikel dirumuskan dalam 5 (lima) bidang prioritas RPJMD (*Tiwu Telu*), dengan proporsi pendidikan 20%, kesehatan 10%, ekonomi dan pariwisata 25%, infrastruktur dan lingkungan hidup 35%, serta penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hukum, hak asasi manusia (HAM), keamanan dan ketertiban sebesar 10%.

Penyerahan alokasi Pides/Pikel, ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Ende tentang fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan yang secara substansi memuat mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan dan rancangan program prioritas Kabupaten Ende untuk dijadikan pedoman dalam perumusan Daftar Usulan RKPDesa/Kelurahan (DU RKPDes/Kel) pada proses Musrenbang Desa/Kelurahan. Surat edaran ini merupakan wujud pembinaan dan pengawasan dalam rangka fasilitasi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana diamanatkan Pasal 115 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 36 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengatur tentang penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke desa.

Selanjutnya, sejalan dengan kewenangan, peran pemerintah kabupaten adalah mengawal Pides/Pikel dimulai pada Forum Musrenbang RKPDes/Kel di Kecamatan. Pada forum ini DU-RKPDes/Kel (Pides/Pikel Desa dan Kelurahan) diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten di kecamatan bersangkutan. Selain itu, forum ini membahas pula usulan kegiatan skala antardesa, skala kecamatan,

dan skala kabupaten. Keluaran utama dari forum ini adalah Rencana Pembangunan Kecamatan untuk menjadi input utama pembahasan pada Forum OPD.

Pelaksanaan Forum OPD di Kabupaten Ende secara teknis dilaksanakan melalui mekanisme Gabungan OPD dengan Bappeda selaku koordinator. Diskusi usulan Pides/Pikel dilakukan secara lebih detail antara delegasi kecamatan dengan SKPD terkait. Selain sinergi program, pada forum ini, dilakukan penajaman indikator dan target sesuai sasaran dalam Rancangan RKPDes/Renja, penyesuaian pendanaan kegiatan berdasarkan pagu indikatif, serta *review* kelengkapan data dukung usulan kegiatan seperti kejelasan status tanah, data kelompok sasaran, serta syarat teknis lainnya sesuai yang telah disepakati pada Forum Musrenbang RKPDes di kecamatan.

Selanjutnya pada pelaksanaan Musrenbang RKPDes, keseluruhan rumusan program dan kegiatan Pides/Pikel hasil Forum Gabungan OPD disepakati melalui penandatanganan berita acara kesepakatan dan secara resmi diserahkan kepada para pihak untuk bersama-sama mengawal keseluruhan usulan sampai pada proses penganggarannya.

TINDAK LANJUT DALAM PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPDes

Sesuai tahapan, proses selanjutnya pasca-Musrenbang RKPDes adalah perumusan Rancangan Akhir RKPDes. Tahapan ini secara operasional merupakan proses sinkronisasi Pides/Pikel (PIW), dengan perumusan program/belanja melalui pendekatan perencanaan lainnya (PI OPD).

Adapun program atau belanja pendekatan lain secara garis besar diuraikan dalam dua bagian, yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur meliputi (1) belanja wajib dan terikat, antara lain belanja gaji dan tambahan tunjangan, belanja beasiswa dan belanja jasa kantor (khusus tagihan listrik, air dan telepon); serta (2) Belanja Rutin OPD dan Jasa Tenaga Kontrak Daerah. Adapun belanja publik meliputi (1) Dana Pengembangan Kecamatan yang dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok

pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses; (2) belanja prioritas utama lainnya yang meliputi pembangunan jalan paralel, pengembangan Bumdes, Pesta Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan; (3) belanja kegiatan *top down* SKPD; 4) Belanja Bantuan Keuangan (ADD dan Bantuan Parpol); serta (5) Belanja Hibah, Bantuan Sosial (Bansos), dan belanja tidak terduga.

Selain sinkronisasi belanja program tersebut, pada tahapan ini juga dilakukan evaluasi terhadap hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD. Keseluruhan belanja tersebut diatas diintegrasikan dengan usulan kegiatan hasil Pides/Pikel menjadi satu kesatuan dan dirumuskan menjadi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Ende untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende. RKPD akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan anggaran, yang didahului dengan pembahasan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Implikasi Pides/Pikel terhadap Kebijakan Anggaran Salah satu fungsi APBD (sebagai anggaran publik) adalah fungsi distribusi. Fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan agar kesenjangan pendapatan antarwarga dapat dikurangi. Melalui anggaran, kesenjangan distribusi pendapatan dapat dikurangi. Indikator ideal dalam rangka optimalisasi fungsi ini adalah dominasi belanja publik dibanding belanja aparatur. Data APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2009–2014 dalam *review* analisis belanja pada dokumen RPJMD menunjukkan bahwa keberpihakan belanja publik masih sangat rendah. Rata-rata belanja publik hanya mencapai 22,69% dari total belanja. Dampak yang dirasakan adalah belum optimalnya pembangunan dan pelayanan publik karena sebagian besar APBD terserap untuk aparatur.

Melalui kebijakan Pides/Pikel secara perlahan telah terjadi perubahan komposisi belanja. Evaluasi yang

dilaksanakan, menunjukkan bahwa rancangan belanja publik meningkat menjadi kurang lebih 40%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan porsi belanja publik sebesar kurang lebih 17% dari rata-rata kondisi kurun waktu 2009–2014. Secara khusus kontribusi Pides/Pikel cukup signifikan memengaruhi porsi karena memberikan kontribusi setengah dari belanja publik (200 milyar rupiah). Penerapan Pides/Pikel juga turut memberikan andil pada komposisi belanja modal, mengingat sebagian besar (kurang lebih 80%) usulan pides/pikel merupakan belanja modal. Pada tataran distribusi (wilayah), Pides/Pikel secara efektif mampu meningkatkan aspek pemerataan anggaran sampai desa dan kelurahan sesuai tematik pembangunan dewasa ini. Data menunjukkan bahwa 60% usulan Pides/Pikel merupakan kegiatan yang dilaksanakan di desa dan kelurahan, 25% skala antara desa kelurahan dan kecamatan, serta 15% skala kabupaten.

PENUTUP

Evaluasi umum terhadap implementasi Pides/Pikel pada perencanaan dan penganggaran telah menunjukkan terjadi pergeseran komposisi belanja aparatur dan publik. Alokasi Pides/Pikel setidaknya membatasi kecenderungan dominasi belanja rutin OPD dan *top down*. Meskipun diakui kebijakan ini belum signifikan membalikan besaran porsi belanja aparatur dan publik, sebagai implikasi realitas tingginya kebutuhan pendanaan pada belanja belanja pegawai. Namun, secara perlahan, sejalan dengan kenaikan penerimaan daerah, tren ke arah tersebut diyakini akan tercapai. Perbedaan pemahaman serta adanya 'keengganan' aparatur sebagai bentuk penolakan 'menurunnya' porsi anggaran aparatur menjadi tantangan yang menarik dalam penerapan kebijakan Pides/Pikel di Kabupaten Ende. Semoga. ■

Profil Penulis

Adrianus Yosafat Muda adalah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV Bappeda Kabupaten Ende



Foto: www.balasanegri.com

Pembangunan Daerah Pinggiran dengan Meningkatkan Daya Saing

Oleh: Budhi Santoso

Dalam RPJMN 2015–2019 yang mengadopsi visi misi Presiden, Nawacita, disebutkan bahwa pembangunan dilakukan mulai dari pinggiran. Wilayah ini meliputi daerah tertinggal, perdesaan, daerah perbatasan, dan transmigrasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah pinggiran pada dasarnya adalah menurunkan kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah yang penduduknya sebagian besar termasuk kategori miskin, diperlukan pendekatan khusus.

Sumber-sumber penghidupan utama masyarakat daerah pinggiran adalah pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, peternakan, perikanan/kelautan, perkebunan/kehutanan, dan hortikultura. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekaligus mengurangi kemiskinan di daerah pinggiran adalah dengan meningkatkan sumber penghidupan utama pertanian dalam arti luas tersebut, dengan tetap melaksanakan program wajib memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing daerah fokus pada pertanian dalam arti luas dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar.

PENDAHULUAN

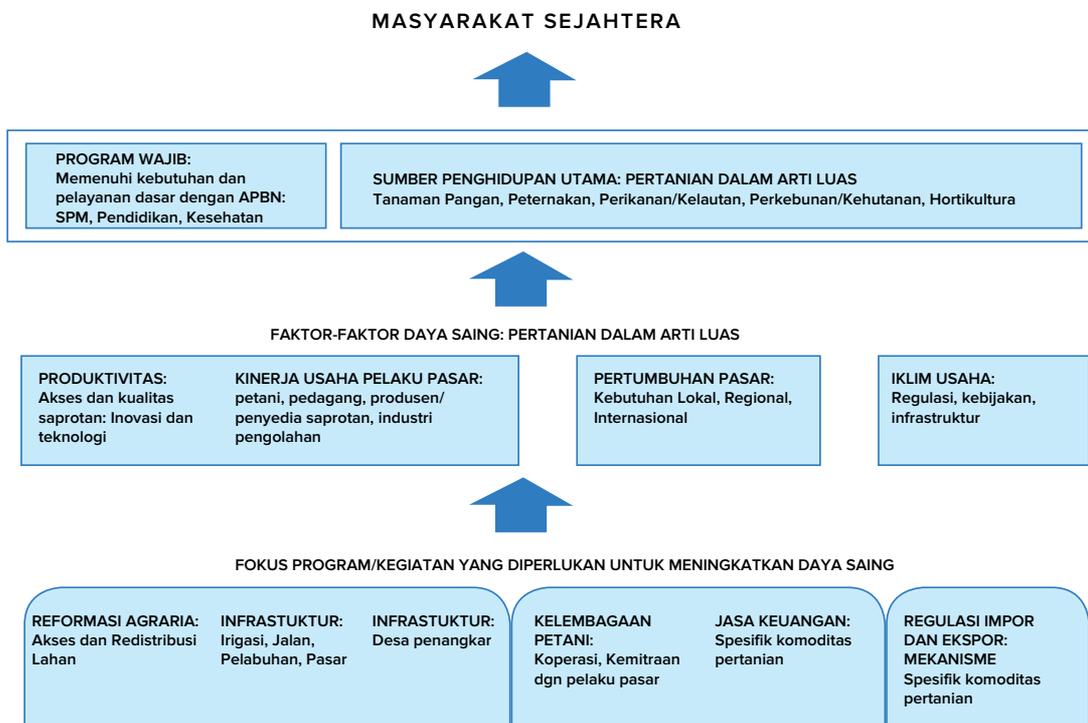
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, tingkat kemiskinan di daerah pinggiran khususnya di daerah tertinggal cukup tinggi, yaitu mencapai 16,7 %, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 11,6 %. Misi yang perlu dilakukan adalah menurunkan kemiskinan di daerah ini menjadi 14 % pada tahun

2019. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pinggiran ini, harus dilakukan dengan menurunkan kemiskinan. Caranya dengan mengembangkan program kegiatan prioritas untuk mengurangi kemiskinan secara maksimal, tetapi dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Percepatan penurunan kemiskinan perlu meningkatkan pembangunan ekonomi lokal daerah pinggiran.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut (pembangunan ekonomi lokal) adalah dengan meningkatkan daya saing daerah, dengan tetap memenuhi kebutuhan dasar. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yang menyebutkan bahwa pembangunan daerah tertinggal, perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan termasuk dalam prioritas nasional pemerataan dan kewilayahan bersama-sama dengan konektivitas, perkotaan, pengurangan *gap* antara tingkat pendapatan, sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Meningkatnya ekonomi daerah pinggiran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah ini secara signifikan. Fokus peningkatan daya saing ini adalah pada mata pencaharian utama di daerah pinggiran yaitu pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan atau industri rumah tangga. Dengan demikian, meningkatkan daya saing daerah berarti meningkatkan daya saing hasil pertanian dalam arti luas tersebut.

Peningkatan daya saing daerah dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor daya saing. Setelah diketahui faktor-faktornya, yang merupakan isu-isu strategis yang harus ditangani, langkah selanjutnya adalah menentukan program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut. Inovasi dan teknologi menjadi daya ungkit percepatan peningkatan daya saing daerah pinggiran.



GAMBAR 1. KERANGKA KERJA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH PINGGIRAN

PEMBAHASAN

Sebagaimana disampaikan pada pendahuluan, kesejahteraan terwujud apabila kita meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan peningkatan daya saing daerah pinggiran. Apa saja faktor-faktor daya saing tersebut? Kerangka kerja peningkatan daya saing daerah di daerah pinggiran disampaikan sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.

Faktor-faktor daya saing tersebut meliputi:

- 1) Produktivitas, yaitu akses dan kualitas saprotan, inovasi dan teknologi (*innovation*);
- 2) Kinerja usaha pelaku pasar, yaitu petani, pedagang, produsen/penyedia saprotan, industri pengolahan (*human resource*);
- 3) Pertumbuhan pasar, yaitu kebutuhan lokal, regional dan internasional (*demand*);
- 4) Iklim usaha, yaitu regulasi, kebijakan dan infrastruktur (*enabling environment*).

Selanjutnya program dan kegiatan prioritas yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing di daerah pinggiran dengan fokus pada pertanian dalam arti luas adalah sebagai berikut.

- 1) Reformasi agraria yang meliputi akses dan redistribusi lahan.
- 2) Pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan di daerah pinggiran seperti jalan kabupaten, jalan desa, air minum, dan listrik.
- 3) Kedaulatan benih (desa, penangkaran) dengan melaksanakan program/kegiatan pengelolaan hasil produksi misalnya dengan teknologi pengolahan hasil panen (inovasi dan teknologi)—inovasi di bidang pertanian menjadi pengungkit peningkatan ekonomi daerah pinggiran.
- 4) Kelembagaan petani (koperasi, kemitraan dengan pelaku pasar) dengan melaksanakan program/kegiatan untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian dalam arti luas (*marketing skill*).
- 5) Program/kegiatan peningkatan kapasitas produsen (petani, nelayan, atau buruh/pekerja) dengan pendidikan atau pelatihan-pelatihan.
- 6) Jasa keuangan (yang spesifik untuk komoditas pertanian) untuk penyediaan permodalan bagi

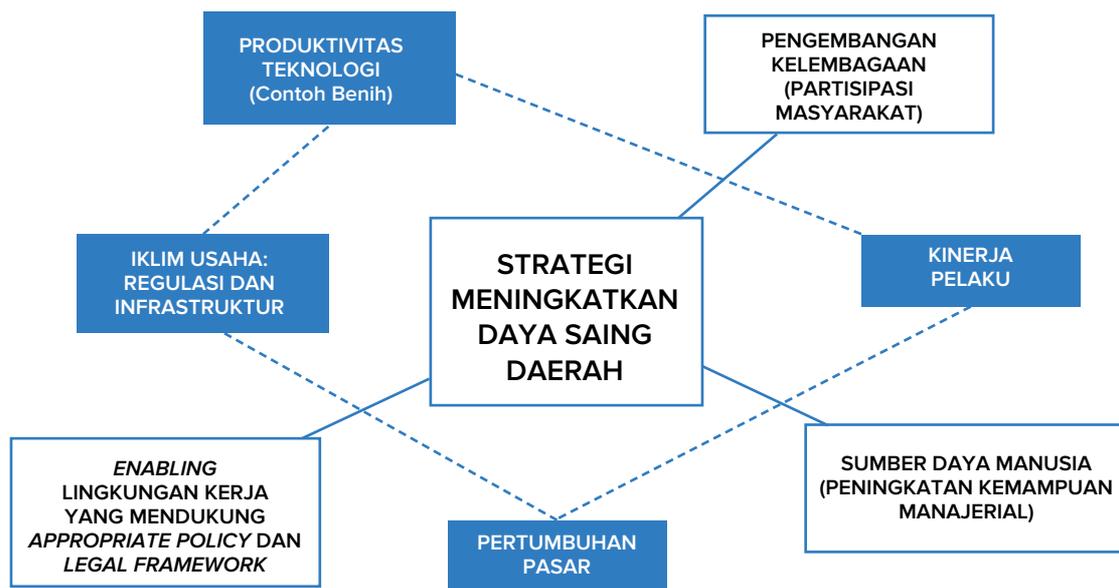
para pelaku ekonomi di daerah-daerah ini, mengingat keterbatasan modal yang dimiliki.

- 7) Regulasi impor/ekspor yang kondusif untuk mendukung agar daya saing daerah semakin menguat.

Program dan kegiatan prioritas tersebut di atas disusun berdasarkan Pola HITS, yaitu menempatkan penurunan kemiskinan di daerah tertinggal sebagai Prioritas Nasional. HITS merupakan singkatan dari Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial. Suatu metodologi yang dikembangkan Bappenas untuk menentukan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebijakan *money follows program*. Dalam RKP 2018, HITS disampaikan menjadi THIS yang konsepnya sama.

Selanjutnya ditentukan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pendekatan HITS. Alokasi anggaran prioritas program/kegiatan yang telah ditentukan dengan HITS tersebut digunakan sebagai dasar kebijakan *money follows program*. Dengan menerapkan pola HITS ini maka didapat program dan kegiatan prioritas yang mendukung terwujudnya upaya meningkatkan daya saing daerah secara efektif dan efisien. Selain itu para *stakeholder* yang terkait dapat ditentukan, yaitu kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bahkan lokasi kegiatan prioritas dapat diketahui yaitu pencantuman ordinat dalam peta. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi program dan kegiatan mengingat tujuan dan sasaran yang akan dicapai sama, yaitu peningkatan daya saing di daerah pinggiran.

Pada Gambar 2 disajikan diagram ringkasan peningkatan daya saing daerah pinggiran. Peningkatan daya saing dilakukan dengan melaksanakan program/kegiatan prioritas terkait dengan (1) pengembangan kelembagaan; (2) sumber daya manusia; dan (3) *enabling environment*. Program/kegiatan prioritas yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan faktor-faktor daya saing yang terdiri dari produktivitas (dengan inovasi dan teknologi), iklim usaha, kinerja petani pelaku dan pertumbuhan



GAMBAR 2. CAPACITY BUILDING DAERAH TERTINGGAL

pasar. Kunci dari upaya meningkatkan daya saing daerah pada pertanian dalam arti luas tersebut di atas adalah ketepatan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang relevan di daerah pinggiran. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, untuk menentukan program dan kegiatan prioritas tersebut maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan pola HITS yang memenuhi kriteria holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan penekanan dalam meningkatkan daya saing di daerah pinggiran adalah program/kegiatan prioritas yang termasuk penguatan kelembagaan (*capacity building*). Mengingat daerah-daerah ini tidak seragam, baik kondisi geografisnya maupun tingkat pendidikan masyarakatnya, maka masih perlu dilaksanakan program/kegiatan terkait dengan *capacity building* tersebut. Program dan kegiatan prioritas terkait dengan *capacity building* adalah peningkatan kapasitas petani, *institutional development*, dan *enabling environment*. Ketiga

fokus ini akan mendukung percepatan keberhasilan upaya pemerintah pemeratakan pembangunan dengan meningkatkan daya saing daerah pinggiran.

Jadi ada 3 (tiga) area yang perlu mendapat perhatian, termasuk dalam *capacity building*, yaitu dari aspek individu, kelompok masyarakatnya dan aspek regulasi (*enabling environment*).

1. Dari segi individu pelaku ekonomi, yaitu petani, nelayan, atau pekerja perlu ditingkatkan kapasitasnya secara teknis, khususnya ditingkatkan kapasitas manajemennya.
2. Dari aspek masyarakatnya, perlu dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan prioritas peningkatan daya saing (*society participation*) dengan memperhatikan *local initiative*.
3. Terkait dengan *enabling environment*, harus disusun peraturan atau regulasi yang selaras dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah pinggiran, dalam upaya meningkatkan daya saing daerah pinggiran yang spesifik tersebut.

Dalam menerapkan *capacity building* bagi masyarakat di daerah tertinggal dan daerah-daerah lainnya tersebut di atas maka yang masih tetap harus dijalankan adalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan standar pelayanan minimum (SPM) lainnya. Keberhasilan *capacity building* bergantung terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar dan SPM tersebut. Dengan demikian, diperlukan sinergi program dan kegiatan prioritas terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM dengan program/kegiatan prioritas untuk meningkatkan daya saing daerah.

KESIMPULAN

Salah satu tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015–2019 dan Nawacita adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah “pinggiran”, yaitu di daerah tertinggal, perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan. Berdasarkan uraian dalam tulisan ini maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pinggiran tersebut, ada 4 (empat) hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

- Pertama, tetap melanjutkan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) lainnya.
- Kedua, melakukan terobosan dengan meningkatkan daya saing daerah dengan fokus pada sektor pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan, dan industri rumah tangga pertanian.
- Kemudian dalam menentukan program dan kegiatan prioritas (dalam kerangka meningkatkan daya saing), perlu dilakukan dengan teliti dan disepakati oleh berbagai pihak dengan menerapkan pola HITS, sehingga didapat program/kegiatan yang efektif dan efisien.
- Akhirnya, perlu dilaksanakan *capacity building* di daerah-daerah tersebut yang sesuai dengan kondisi geografis dan ragam masyarakatnya.

Terkait dengan *capacity building* maka kegiatan perlu fokus pada tiga hal, yaitu (1) sumber daya manusia, misalnya meningkatkan kemampuan manajerial masyarakat; (2) mengembangkan kelembagaan, contoh meningkatkan partisipasi masyarakat; dan (3) menyediakan faktor *enabling*, yaitu menjaga lingkungan kerja yang mendukung (*appropriate policy and legal framework*).

Faktor eksternal upaya peningkatan daya saing adalah iklim usaha kondusif yang dikondisikan dengan penetapan regulasi yang mendukung kinerja masyarakat daerah pinggiran. Infrastruktur juga harus tersedia dengan baik. Selanjutnya yang dapat melakukan loncatan daya saing daerah adalah penerapan inovasi, misalnya dengan pengembangan teknologi perbenihan.

Jadi pada prinsipnya, ketika produk pertanian di daerah pinggiran bisa menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing, akan berdampak pada pertumbuhan pasar yang semakin meningkat. *The last but not the least*, peningkatan daya saing juga bergantung kepada kinerja pelaku. Beberapa aspek yang memengaruhi kinerja pelaku adalah pendidikan dan pelatihan, di samping sikap mental masyarakat yang suka bekerja atau bermalas-malasan. ■

REFERENSI

- Bappenas, 2017, “Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018”, Bappenas
- Bappenas, 2016, “Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017”, Bappenas
- Bappenas, 2015, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019”, Bappenas.
- European Community, 2017, “*Increasing Competitiveness through Innovation*”, <http://ec.europa.eu/cip>

Profil Penulis

Budhi Santoso merupakan Perencana Utama di Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas



Foto: www.aksiopepeleikantoxh.com

Antisipasi Serangan **RANSOMWARE**

Masih hangat beberapa waktu lalu dunia *cyber* dibuat gempar oleh serangan WannaCry yang dianggap sebagai “virus” komputer yang sangat ganas. Program jahat tersebut telah menyerang jaringan komputer secara global. Berbagai perusahaan dunia seperti FedEx, Petro China, Telenor Hungary, Honda, Portugal Telecom, hingga Russian Railways tak luput dari serangannya. Beberapa *server* milik pemerintahan India, Cina, Rumania, dan Inggris, *server* milik beberapa universitas, serta *server* beberapa rumah sakit di Indonesia pun menjadi sasaran serangan program jahat ini.

WannaCry mengunci dokumen penting dari *server* perusahaan yang diserang, membuatnya tidak bisa diakses. Efek yang ditimbulkan akibat serangan WannaCry sangatlah dahsyat. Sebagai contoh, jika program jahat tersebut menginfeksi keseluruhan data digital dalam sistem perbankan, apa yang akan terjadi? Semua data nasabah, pencatatan tabungan nasabah, data pinjaman, bunga, dan

data-data penting lainnya akan terkunci dan tidak dapat diakses. Jika hal itu terjadi, bank tersebut bisa dipastikan akan lumpuh hingga data-data penting tersebut lepas dari jeratan sang “penjahat digital”.

Dalam dunia TI, WannaCry digolongkan sebagai *ransomware*. Ke depan, ada kemungkinan jenis-jenis *ransomware* yang lain akan kembali menyerang. Sebagai antisipasi, ada baiknya Anda mengenal terlebih dahulu mengenai *ransomware*, cara penyebarannya, dan langkah pencegahannya.

Apa itu Ransomware?

Ransomware adalah sebuah jenis *malware*/program jahat yang bekerja dengan mengunci dokumen hingga menutup akses komputer dengan enkripsi khusus. Dokumen dikondisikan sedemikian rupa sehingga hanya dapat dibuka kembali dengan memasukkan kode unik yang dibuat oleh pembuat *malware* tersebut. *Ransomware* umumnya dilengkapi dengan pesan ancaman untuk meminta uang tebusan kepada pemilik dokumen.

Bagaimana Ransomware Menyebar?

Kebanyakan *ransomware* menyebar tersembunyi di dalam *file* dokumen Word, Excel, PDF, dan *file* lain yang sering digunakan sebagai lampiran (*attachment*) pos elektronik (*pos-el/e-mail*). *Ransomware* bisa pula menyebar melalui *link* jebakan yang diklik oleh peselancar dunia maya. Selain itu, program jahat ini dapat menyebar melalui infeksi sekunder pada komputer yang sudah terinfeksi virus yang menyediakan *back door* untuk serangan selanjutnya. Sejauh ini, *ransomware* (termasuk WannaCry) lebih banyak menyerang korban yang menggunakan sistem operasi Windows.

Cara Mencegah Ransomware

Pencegahan *ransomware* bisa berbeda-beda bergantung jenisnya. Beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan sedikit teknis sehingga Anda mungkin memerlukan bantuan tenaga ahli TI. Berikut ini adalah cara pencegahan *ransomware* untuk jenis WannaCry.

1. Putus koneksi jaringan komputer, baik dari jaringan kabel *Local Area Network* (LAN) maupun *Wireless Fidelity* (WiFi) untuk mencegah infeksi.
2. Lakukan penyalinan (*back up*) data. Usahakan untuk menyimpan data-data berharga tersebut di tempat penyimpanan terpisah yang tidak terhubung dengan jaringan atau internet.
3. Lakukan pemutakhiran (*update*) Windows ke versi *patch* yang terbaru.
4. Matikan fitur Macros pada program-program Office (Word, Excel, PowerPoint, dan sejenisnya).
5. Nonaktifkan fitur SMB 1.0 pada Windows dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk Windows 7
 - Jalankan Windows Powershell (*run as administrator*).
 - Masukkan *script* berikut "Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB1-Type DWORD -Value 0 -Force" lalu tekan Enter.
 - b. Untuk Windows 8
 - Jalankan program Windows Powershell (*run as administrator*).
 - Masukkan *script* berikut "Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol \$false" lalu tekan Enter.
 - c. Untuk Windows 8.1 dan Windows 10
 - Masuk ke Control Panel, klik Programs, klik Turn Windows Features On or Off.
 - Hilangkan centang pada SMB 1.0 lalu klik OK.
6. Aktifkan Windows Firewall dan blokir Port 138 (TCP), 445 (UPD), dan 3389 (RDP) dengan cara sebagai berikut:
 - Masuk Control Panel, klik Windows Firewall, klik Advanced Settings pada bagian kiri panel, klik tab Inbound Rules, kemudian klik New Rule.
 - Pilih opsi Port kemudian pada Specific Port tuliskan *port-port* yang akan diblokir, yaitu Port 138 (TCP), 445 (UPD), dan 3389 (RDP).
 - Klik Next kemudian pilih opsi Block the Connection.
 - Klik Next lalu beri nama *rule* kemudian tekan tombol Finish.



Kesimpulan

Kejadian serangan *cyber* yang baru-baru ini terjadi telah memberi pelajaran tentang pentingnya keamanan data. Setiap komponen dalam sebuah korporasi hendaknya paham dasar-dasar keamanan komputer dan jaringan. Diserangnya suatu sistem sering kali terjadi disebabkan karena kurang *aware*-nya komponen/personal dalam korporasi tentang keamanan komputer di lingkungan perusahaan sehingga menjadi celah yang mudah diserang oleh pihak lain. **(Penulis: Dendi Mukti Putranto/ Pusbindiklatren) ■**

Sistem Aplikasi Pengelola Widyaiswara/Pengajar Diklat Perencanaan yang Cepat, Mudah, dan Transparan.

Informasi selengkapnya kunjungi:
<http://sipena.bappenas.go.id/>



Kementerian PPN/
Bappenas

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285
Faksimile (021) 31928281
Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id



SEMINAR NASIONAL & TEMU ALUMNI

BEASISWA OTO/PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Tema: Pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Menuju ASN Profesional

1-2 November 2017

di Hotel Bidakara, Jakarta

Jln. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan

:: TUJUAN

1. Membangun jejaring antaralumni
2. Meningkatkan kerja sama antarinstansi
3. Mendapatkan masukan dari alumni mengenai pengembangan SDM aparatur pemerintah

:: KELUARAN (OUTPUT)

1. Terbentuknya Forum Alumni Pusbindiklatren Bappenas
2. Tersampainya program-program Pusbindiklatren ke instansi-instansi alumni
3. Rekomendasi pengembangan SDM aparatur pemerintah menuju ASN profesional

:: AGENDA

- Panel Diskusi “Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM ASN”
- Panel Diskusi “Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pembangunan”
- Diskusi Kelompok “Pentingnya Jejaring Alumni dan Pembentukan Forum Alumni”
- *Informal Meeting* dan Malam Ramah Tamah

PENDAFTARAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT
DAPAT DILIHAT DI:

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/temu_alumni

:: NARASUMBER (dalam konfirmasi)

- **Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.**
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- **Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.S.I.S.**
Kepala Badan Kepegawalan Negara (BKN)
- **Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc.**
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
- **Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A.**
Wakil/Pit. Gubernur Provinsi Bengkulu
- **Ir. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc., Ph.D.**
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
- **Denny Januar Ali, M.P.A., Ph.D.**
Ketua Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
- **Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)**
- **Perwakilan JICA**
- **Perwakilan World Bank**

:: PESERTA

- Alumni Diklat Gelar dan Diklat Non-Gelar Pusbindiklatren Bappenas, baik dalam negeri maupun luar negeri, di bawah skema program PHRD dan SPIRIT
- Peserta mencakup alumni OTO Bappenas sampai dengan alumni Pusbindiklatren Bappenas intake 2015
- Kuota 500 peserta; dengan mempertimbangkan proporsi program gelar, non-gelar, skema program, dan tahun kelulusan

:: NARAHUBUNG (CONTACT PERSON)

- Karyoto: 0813-1068-2320
- Dwiyanto/Feita/Nita:
(021) 3192-8279, 3192-8280, 3192-8285



* Pendaftaran dibuka hingga
13 Oktober 2017